

**RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI  
DAERAH BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**  
(Studi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Dan UKM Kabupaten  
Pohuwato, Gorontalo)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**PEPEN H. AKUBA  
NIM. 125030606111002**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

**RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI  
DAERAH BERBASIS KEWIRAUSAHAAN**  
(Studi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Dan UKM Kabupaten  
Pohuwato, Gorontalo)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**PEPEN H. AKUBA  
NIM. 125030606111002**



**Dosen Pembimbing :**

**Dr. Mochammad Rozikin, M.AP  
Ainul Hayat S.Pd, M.Si**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
MALANG  
2018**

## **MOTTO**

"MANUSIA TIDAK MERANCANG UNTUK GAGAL, MEREKA GAGAL  
UNTUK MERANCANG."

(WILLIAM J. SIEGEL)

“JADIKAN HARI INI HARIMU, KEMARIN TELAH PERGI BERLALU,  
BESOK BELUM TENTU KAU MASIH ADA”

(PEPEN H. AKUBA)

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU  
KEPADA AYAHANDA HASAN A. AKUBA DAN  
IBUNDA SUUD THAIB TERCINTA  
KANDA ANISA H. AKUBA TERSAYANG  
SAHABAT-SAHABATKU  
IDRIS BIKI, BAMBANG A. DUNGGIO, SUFRIYADIN YUSUF  
SERTA PASANGAN SAYA HERYAWATI HUSAIN



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

### **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis  
Kewirausahaan (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi,  
dan UKM Kabupaten Pohuwato, Gorontalo).

Disusun Oleh : Pepen H. Akuba

NIM : 125030606111002

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Minat : Perencanaan Pembangunan

Malang 11 Desember 2017

#### **Komisi Pembimbing**

**Ketua Komisi Pembimbing**

**Dr. Mochamad Rozikin, M.AP**  
**NIP. 1963503 198802 1 001**

**Anggota Komisi Pembimbing**

**Ainul Hayat, S.Pd, M.Si**  
**NIP. 19730713 100604 1 001**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 12 Januari 2018  
Jam : 09.00 – 10.00 WIB  
Skripsi atas nama : Pepen H. Akuba  
Judul : Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis  
Kewirausahaan (Studi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan  
Koperasi Dan UKM Kabupaten Pohuwato, Gorontalo)

dan dinyatakan **LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua

**Dr. Mochammad Rozikin, M.AP**  
**NIP. 1963053 198802 1 001**

Anggota

**Ainul Hayat, S.Pd, M. Si**  
**NIP. 19730713 200604 1 001**

Penguji I

**Drs. Sukanto, MS**  
**NIP. 19600430 198601 1 001**

Penguji II

**Ike Arni Noventi, M.AP**  
**NIK. 20130986 1009 2 001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 11 Desember 2017



Pepen H. Akuba  
NIM. 125030606111002



## RINGKASAN

Pepen H. Akuba, 2018. **Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Gorontalo)**. Minat Perencanaan Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Dosen Pemimbing: (1) Dr. Mochamad Rozikin M.AP. (2) Ainul Hayat S.Pd, M.Si.

Peran kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi di suatu daerah dirasa sangat penting, karena bisa menyerap tenaga kerja di sekitar daerah tersebut. Dalam mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam pengembangan ekonomi daerah, pembudayaan wirausaha kepada masyarakat sangat dibutuhkan. Dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangatlah diperlukan. Pemerintah daerah Pohuwato dalam mendukung adanya kegiatan perekonomian melalui wirausaha ditunjukkan dengan terbentuknya rencana strategi yang nantinya akan diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Pohuwato yang mandiri dan berdaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan perangkat penunjang lainnya seperti alat perekam suara, buku catatan dan alat tulis. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana 2014.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan strategi pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UKM sudah baik namun belum maksimal, terbukti bahwa dalam penyusunan rencana strategi melalui program fasilitasi pembangunan usaha dengan kegiatan berupa pendampingan dalam pemecahan masalah berjalan dengan baik, dan pada rencana strategi pemasaran berupa pelatihan teknologi pengemasan juga baik. Akan tetapi kurangnya monitoring serta evaluasi pada kegiatan pendampingan masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga kurangnya standarisasi pada pengemasan produk yang akan dipasarkan.

***Kata kunci: Perencanaan Strategi, Pengembangan Ekonomi, Kewirausahaan.***



## SUMMARY

Pepen H. Akuba, 2018. **Strategy Planning in Regional Economic Development based on Entrepreneurship (Case Study on Departement of Industry Trading Cooperative and UKM at Pohuwato District)**. Development Planning Interest. Major of Public Administration. Department of Administrative Sciences. Brawijaya University. Supervisor: (1) Dr. Mochamad Rozikin M.AP. (2) Ainul Hayat S.Pd, M.Si

The role of entrepreneurship on local economic development is important, because can absorbing labor. To optimize local economic, entrepreneur culturing to community is a necessary. Support from central government and local government is necessary too. Pohuwato's local government to support economic activity on entrepreneur shown by building a Strategic Planning who can be applied to the community, so it can be materialized by community of Pohuwato become independent and empower.

The paradigm used in this research is descriptive research with qualitative approach. The data source is the primary and secondary data. The instrument used is the researcher it self, with the interview guidelines, and other supporting equipment used like the voice recorder and, notes and writing tools. In analyzing the data, researcher refers to the methods stated by Miles, Huberman, and Saldana 2014.

The result of this research, shown that strategic planning to develop local economic done by Departement of Industry Trading Cooperative and UKM is worked out but not at maximum yet, it proven by the program of strategic planning to facilitate developer with mentoring program and marketing plan program at packaging technologies trainee both are work out well. But lack of monitoring and evaluating process are done by local government, also at standardization on packaging product are less to do.

***Keyword: Strategy Planning, Economic Development, Entrepreneur.***

## **KATA PENGANTAR**

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., P.hD selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Koordinator Minat Perencanaan Pembangunan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Mochamad Rozikin M.AP. selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta kesabarannya

untuk terus memberikan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ainul Hayat S.Pd, M.Si. selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar dan menyempatkan waktu disela-sela kesibukan untuk memberikan bimbingan dan saran-saran yang membangun agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan serta Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan.
7. Seluruh narasumber yang telah membantu melancarkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data penelitian.
8. Seluruh teman-teman Perencanaan Pembangunan Angkatan 2012 terutama Sigid W. Amaja, Muhsin Widyatmoko, Abdul Rahman, Rizky A. Ramadhan, Tino P. Setiadi, Anas Azhari, Arif Sofi, Bayu N. Kusumo, Nur Ranggantara, Nabila Ranifitri, Rericia I. Nabila, Hanna Syabrina, Sheli Aknestesia, Fitra Nanda, Titik N. Hida yang memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
9. Seluruh teman-teman beasiswa daerah dan beasiswa pertamina Rahmad Mohamad, Manan Sudirman, Ishak Goi, Risman Kadir, Andi J. Prasetyo, Mar'atus Soleha, Dilla Nento, Sri O. Abdullah, Pipin Sairullah, Indrawati Baino, Winarti Dunggio, Cindrawati Dinggou yang selalu memberikan dukungan moril maupun materi serta doa untuk penulis.

10. Keluarga Asrama Mahasiswa Gorontalo Cabang Malang Gito Ali, Dwi Susanto, Hamdan Usman yang selalu memberikan support serta lelucon yang menjadi hiburan tersendiri disaat penulis merasa jenuh.
11. Kakak-kakak dan adik-adik Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) cabang Malang serta Pengurus Besar atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
12. Serta semua pihak terkait yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha memberikan hasil yang terbaik, tetapi penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis menagharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis memohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan di hati, itu semata-mata datang dari penulis dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Malang, 11                      Desember  
2017

Penulis  
Pepen H. Akuba

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>COVER .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>TANDA PESETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian.....	8
E. Sistematika Penelitian .....	9
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Pembangunan .....	11
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	11
2. Definisi Pembangunan .....	12
3. Definisi Administrasi Pembangunan .....	12
4. Perencanaan Dalam Administrasi Pembangunan .....	13
B. Pembangunan Daerah.....	14
1. Pengertian Pembangunan Daerah.....	14
2. Manajemen Pembangunan Daerah .....	18
3. Perencanaan Pembangunan Daerah .....	22
C. Rencana Strategi.....	34
D. Kewirausahaan.....	47
1. Pengertian Kewirausahaan .....	47
2. Wirausaha.....	49
3. Karakteristik Kewirausahaan .....	51
4. Pembelajaran Kewirausahaan .....	54
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Fokus Penelitian .....	60
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	61

D. Jenis dan Sumber Data .....	62
E. Teknik Pengumpulan Data .....	63
F. Instrumen Penelitian.....	66
G. Analisis Data .....	68

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	73
1. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato .....	73
a. Sejarah Kabupaten Pohuwato .....	73
b. Keadaan Geografis .....	75
c. Visi dan Misi Kabupaten Pohuwato .....	77
1) Visi.....	77
2) Misi.....	78
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato .....	78
a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato .....	78
1) Visi.....	78
2) Misi.....	79
b. Tugas Pokok dan Fungsi.....	80
1) Kepala Dinas.....	80
2) Sekretaris Dinas .....	81
3) Bidang Perindustrian .....	84
4) Bidang Perdagangan .....	90
5) Bidang Koperasi dan UKM .....	94
c. Struktur Organisasi .....	99
B. Penyajian Data Fokus Penelitian.....	100
1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.....	100
a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen.....	100
b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.....	106
c. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM .....	110
2. Pelatihan Teknologi Pengemasan bagi Pelaku UKM.....	113
C. Pembahasan Data .....	120
Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah berbasis Kewirausahaan.....	120
1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah.....	120
a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen.....	122
b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.....	124
c. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM .....	126
2. Pelatihan Teknologi Pengemasan bagi Pelaku UKM.....	126

<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>137</b>



## **DAFTAR TABEL**

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Pohuwato 2006–2015 .....	6
2.	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pohuwato, 2015 .....	6
3.	Proses Perencanaan Pembangunan Daerah .....	31
4.	Ciri-ciri dan Sifat Wirausaha .....	53

## DAFTAR GAMBAR

<b>No.</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
1.	Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah .....	46
2.	Penyusunan dan Penetapan RPJM .....	46
3.	Pola Dasar Pembelajaran Kewirausahaan .....	58
4.	Proses analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana 2014.....	71
5.	Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM, Kabupaten Pohuwato .....	99
6.	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021 .....	102
7.	Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021 .....	106
8.	Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021 .....	110
9.	Ikan Roa Kering .....	115
10.	Sambal Ikan Roa dalam Kemasan Tabung .....	115
11.	Renja Program Iklim investasi dan Iklim Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri UKM kabupaten Pohuwato 2018 .....	116

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada dasarnya pembangunan merupakan bentuk usaha pencapaian suatu perubahan yang bersifat perbaikan ataupun peningkatan. Pembangunan juga merupakan sesuatu yang dari, oleh dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakatnya (Mardikanto dan Soebianto, 2012).

Pembangunan di suatu negara disebut juga pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah suatu prioritas yang dilakukan oleh negara yang sedang berkembang seperti juga halnya negara indonesia. Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan nasional adalah bidang ekonomi. Bidang ekonomi peran yang vital dalam proses keberlangsungan suatu negara. Tanpa adanya ekonomi yang mendukung, suatu negara tidak akan bisa mengelola semua aspek yang ada dalam negara tersebut. Didalam pembangunan nasional dibutuhkan kesinambungan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan dari pelaksanaan dapat terwujud sesuai dengan yang telah direncanakan.

Adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sistem pemerintahan indonesia berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi, yakni memposisikan

pemerintah daerah sebagai penanggung jawab utama atas kebijakan penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi diharapkan memberikan peluang yang seluas-luasnya terhadap partisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan daerahnya masing-masing. Hal ini juga didukung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2005-2025, yang menyebutkan bahwa untuk memperkuat daya saing bangsa, salah satu kebijakan pembangunan jangka panjang adalah dengan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan masing-masing wilayah menuju keunggulan yang kompetitif.

Pembangunan ekonomi di daerah dapat diwujudkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan *entrepreneur* lokal. Potensi *entrepreneur* lokal dalam pembangunan daerah dapat mengurangi ketimpangan sosial masyarakat. Seringkali peran *entrepreneur* lokal dalam berinvestasi dan mengelola sektor primer menjadi sekunder dan tersier lebih rendah dibandingkan dengan investor asing, sehingga membuat ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan realita pendapatan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan daerah, maka kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan *entrepreneur* perlu diberi perhatian.

Sebagai lembaga ekonomi, kewirausahaan berperan strategis untuk menurunkan kemiskinan dengan menciptakan peluang-peluang kerja yang diinisiasi masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulannya masing-masing. Salah satu

agenda untuk mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan adalah melalui pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan sebagaimana tergambar dalam visi dan misi pemerintah. Kewirausahaan didorong untuk berkembang luas sesuai kebutuhan sehingga menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif masyarakat di berbagai sektor kegiatan ekonomi, sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, diperlukan revitalisasi fungsi kewirausahaan yang didasarkan pada manajemen sumber daya berbasis masyarakat dengan melibatkan peran pemerintah dan masyarakat secara partisipatif.

Untuk mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam perekonomian Indonesia, diperlukan langkah-langkah untuk mengembangkan paradigma baru dalam pembangunan kewirausahaan. Pembudayaan kewirausahaan sebagai gerakan ekonomi rakyat harus didukung oleh politik hukum pemerintah, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, untuk menyusun rencana strategi dalam menggagas kewirausahaan dan kemitraan berdasarkan manajemen integratif.

Dalam pembangunan kewirausahaan, Indonesia memiliki modal dasar untuk mengembangkan kewirausahaan sebagai pondasi ekonomi sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yaitu: “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”.

Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu wilayah di Provinsi Gorontalo memiliki peluang yang potensial untuk menggerakan pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan dalam strategi peningkatan taraf hidup masyarakat serta proses pembangunan daerah. Kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bonebolango dan Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo yang ditanda tangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kabupaten Pohuwato secara resmi pada tanggal 6 mei 2003 yang ditandai dengan pelantikan Drs. Jahja K Nasib sebagai penjabat Bupati Pohuwato.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang tersebut antara lain disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Boalemo yang mempunyai luas wilayah  $\pm 6.761,67 \text{ Km}^2$  perlu dibentuk Kabupaten Pohuwato yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Popayato, Kecamatan Lemito, Kecamatan Randangan, Kecamatan Marisa, dan Kecamatan Paguat dengan luas wilayah keseluruhan  $\pm 4.244,31 \text{ Km}^2$ .

Kondisi dan potensi yang ada di Kabupaten Pohuwato perlu dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terutama dalam pengembangan kewirausahaan serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato harus segera menetapkan strategi guna mengatasi permasalahan yang ada dalam mengembangkan kewirausahaan. Dengan melakukan usaha-usaha atau langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada sehingga kewirausahaan dapat berkembang.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato merupakan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan. Melalui Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Pohuwato. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, dengan melakukan perencanaan terpadu dan menselaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 5 (Lima) Tahun, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato serta menganalisis kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Pohuwato dalam pengembangan kewirausahaan.

Berikut adalah data kondisi sosial berdasarkan garis kemiskinan dan penduduk miskin Kabupaten Pohuwato yang menjadi salah satu pertimbangan dalam peningkatan taraf hidup melalui kewirausahaan:



**Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin  
di Kabupaten Pohuwato, 2006–2015**

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah (ribu) Total (thousand)	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2006	137 017	35.10	32.06
2007	147 750	31.30	29.74
2008	158 393	24.50	23.28
2009	183 215	22.49	21.15
2010	194 335	24.20	18.73
2011	210 033	28.51	21.58
2012	211 204	27.68	20.18
2013	212 629	30.19	21.47
2014	214 146	29.85	20.69
2015	222 996	32.70	22.43

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2016*

**Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis kelamin di Kabupaten  
Pohuwato, 2015**

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Angkatan Kerja	43 576	21 929	65 505
Bekerja	42 996	21 159	64 155
Pengangguran Terbuka	580	770	1 350
Bukan Angkatan Kerja	8 975	29 157	38 132
Sekolah	4 999	4 378	9 377
Mengurus Rumah Tangga	1 671	23 585	25 256
Lainnya	2 305	1 194	3 499
<b>Jumlah</b>	<b>52 551</b>	<b>51 086</b>	<b>103 637</b>
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	82.92	42.93	63.21
Tingkat Pengangguran	1.10	1.51	1.30

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato 2016*

Berdasarkan kondisi dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Pohuwato menjadi peluang besar untuk mengimplementasikan strategi pengembangan

kewirausawan. Dalam hal kondisi daerah dengan angka kemiskinan serta pengangguran yang relatif tinggi menjadi terobosan yang signifikan dalam mengantisipasi terjadinya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan jumlah lapangan kerja. Kewirausawan sebagai kemampuan mengidentifikasi peluang, peluang kewirausahaan adalah suatu situasi dimana orang dapat menciptakan kerangka kerja baru untuk mengoptimalkan sarana guna mencapai tujuan dengan mengombinasikan *resources* yang ada sehingga dapat menghasilkan manfaat. Kewirausahaan mengatur *resources* dan menyebarkan agar dapat memenuhi kebutuhan atau tuntutan masyarakat terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi masyarakat. Serta kewirausahaan sebagai seni membuat keputusan, Intinya adalah bagaimana secara efektif mewujudkan tujuan dimasa depan. Kewirausahaan memiliki kesadaran tentang adanya peluang ber laba dalam situasi yang tidak pasti. Kewirausahaan menerjemahkan gagasannya dengan melihat bahwa inovasi itu membutuhkan investasi dalam situasi yang tidak pasti. Oleh karenanya perlu dikawal melalui badan pengatur agar memberikan manfaat besar bagi publik. Keberhasilan membuat keputusan yang tepat dan benar akan meningkatkan reputasi pejabat publik. Demikian pula dengan potensi yang dimiliki kabupaten pohuwato dari Sumber Daya Alam (SDA) berupa perkebunan dan pertanian berupa jagung, coklat dan kelapa, serta perikanan berupa ikan roa dan cakalang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat di kelola untuk mengembangkan kewirausahaan.

Dalam hal ini strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pohuwato adalah merencanakan program-program yang mendukung dalam menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan kewirausahaan untuk memanfaatkan peluang serta memecahkan permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat. Dari uraian diatas penulis berminat untuk melakukan penelitian tentang **RENCANA STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (Studi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM Kabupaten Pohuwato, Gorontalo).**

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimanakah Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

## **D. Kontribusi Penelitian**

### **1. Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi salah satu masukan atau sumber informasi untuk para akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha.

## 2. Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau pertimbangan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan setra melakukan upaya melalui Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini ddiharapkan menjadi sarana sosialisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun sosial dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan tentang Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab I terdapat pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang tentang Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha yang kemudian diuraikan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab II terdapat uraian mengenai landasan teori,temuan ilmiah pada buku dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Pembangunan Daerah, Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab III Menjelaskan tentang langkah-langkah metode penelitian yang diambil yaitu meliputi jenis penelitian yang digunakan, fokus penelitian, pemilihan lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data untuk penelitian.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menjelaskan tentang uraian mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

### BAB V PENUTUP

Bab V berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian dan juga sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat berguna dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam kaitannya dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Administrasi Pembangunan**

##### **1. Pengertian Administrasi Pembangunan**

Administrasi adalah hal penting dalam suatu organisasi untuk melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Darmadi dan Sukidin, 2009) mengatakan bahwa administrasi memiliki arti sempit dan arti luas sebagai berikut:

1. Arti sempit, administrasi merupakan penyusunan, pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan dan informasi secara sistematis serta memudahkan memperolehnya kembali.
2. Arti luas, istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Namun tidak semua kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang bisa disebut administrasi.

Sedangkan (Siagian 2007) mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan dari beberapa pengertian administrasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama dua orang atau lebih dalam penyusunan, pencatatan data dan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **2. Definisi Pembangunan**

Pembangunan adalah suatu kegiatan yang secara sadar dilakukan untuk tumbuh atau berkembang. Pembangunan adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap Negara karena keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari hasil pembangunannya. (Trijono, 2007) Pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik secara individual maupun kelompok, dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan, baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Pembangunan merupakan gejala sosial yang berdimensi banyak dan dapat didekati dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan (Suryono, 2010) mengatakan bahwa pembangunan berasal dari kata “bangun” yang berarti sadar. Dalam kata kerja bangun juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi bentuk, fisiologi dan perilaku. Lebih dari itu pembangunan juga telah menjadi bahasa dunia yang berarti keinginan bangsa-bangsa mencapai masa depan yang lebih baik. Berdasarkan beberapa pengertian pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan suatu bangsa secara sadar untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

## **3. Definisi Administrasi Pembangunan**

Administrasi Negara berasal dari kata “administrasi” dan “pembangunan”. Administrasi pembangunan dapat berarti suatu kerjasama dua orang atau lebih untuk menumbuhkan atau mengembangkan tujuan yang telah direncanakan. (Siagian, 2007) mengatakan bahwa administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yang pertama administrasi dan yang kedua adalah pembangunan. Administrasi adalah



keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan biasanya didefinisikan sebagai usaha / rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nations building*). (Siagian, 2007) mengatakan bahwa maka administrasi Pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk tumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhir.

Sedangkan (Riggs, 1986) mengatakan bahwa administrasi pembangunan menunjukan pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek terkait guna mencapai sasaran pembangunan. Dari beberapa definisi administrasi pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa yang diorganisasikan untuk melakukan program-program atau proyek-proyek dalam rangka mencapai tujuan.

#### **4. Perencanaan Dalam Administrasi Pembangunan**

Perencanaan merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan harus disusun terlebih dahulu sebelum melaksanakan suatu kegiatan atau pembangunan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

(Tjokroamidjojo, 1974) mengatakan bahwa terdapat beberapa pengertian perencanaan dalam Perencanaan Pembangunan, yaitu:

1. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.
2. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.
3. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Berdasarkan dari pengertian perencanaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan agar lebih efektif dan efisien. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh pelaku administrasi pembangunan akan berpengaruh terhadap program-program yang ada didalamnya. Sedangkan mencetak wirausahawan adalah salah satu program-program tersebut. Sehingga perencanaan dan penetapan tujuan suatu administrasi pembangunan juga akan berpengaruh terhadap pembangun daerah serta pengembangan kewirausahaan.

## **B. Pembangunan Daerah**

### **1. Pengertian Pembangunan Daerah**

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab

masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti dikemukakan oleh (Sukirno, 2000) yaitu:

- a. Sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah.
- b. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional.

Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik.

Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor *returns*) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat

keterbukaannya. Dalam sistem wilayah mobilitas barang maupun orang atau jasa relatif lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2005).

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh daerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan yang perencanaan, pembiayaan, dan pertanggung jawabannya dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir, 2002).

Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain. (Munir, 2002).

Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah: di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi

dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya.

Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan kordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain.

Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun.

Namun dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalau tercapai karena perencanaan yang jauh dari sempurna oleh sesuatu daerah, organisasi tidak efisien, kurangnya informasi mengenai potensi daerah dan berbagai faktor lain. Sebagai akibat banyaknya kekurangan dalam merumuskan dan melaksanakan penyebaran

proyek-proyek ke berbagai daerah, pemerintah daerah dengan bantuan badan perencanaan daerah yang bersangkutan haruslah secara aktif membantu perumusan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi atau variabel. Berdasarkan Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (2006), pembangunan dapat dibedakan menjadi :

- a. Segi pembangunan sektoral, yakni pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.
- b. Segi Pembangunan Wilayah, yakni meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut.
- c. Segi Pemerintahan, yakni agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab.

## **2. Manajemen Pembangunan Daerah**

Pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya milik daerah dalam pembangunan daerah tersebut, maka manajemen pembangunan daerah adalah salah satu model atau

cara untuk menjadi pengendali dalam pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan ketidak efisienan dan ketidak efektifan pemanfaatan sumber daya.

Secara harfiah, istilah pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management dalam bahasa Inggris. Kata ini berasal dari kata kerja *to manage* yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, memperlakukan, dan mengelola (lihat kamus bahasa Inggris oleh John M. Echols dan Hassan Shadily, 1995). Sekarang kata ini sudah umum dipakai sehingga istilah manajemen dan pengelolaan adalah dua kata dengan makna yang sama dan sering dipakai secara bergantian.

Menurut Ensiklopedi Administrasi Indonesia, manajemen adalah segenap kekuatan menggerakkan sekelompok orang yang mengerahkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu di dalam buku prinsip-prinsip manajemen (George R. Terry, 2009) dinyatakan bahwa terdapat empat fungsi manajemen yaitu POAC (*planning, organizing, actuating, dan controlling*) sebagai pendukung dari manajemen pembangunan daerah.

a. Perencanaan (*Planning*)

*Planning* adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dalam sebuah organisasi. Perencanaan merupakan proses yang penting dari segala bentuk fungsi Manajemen, karena tanpa adanya perencanaan semua fungsi-fungsi lainnya tidak akan dapat berjalan.

Dalam perencanaan, terdapat beberapa faktor dalam perencanaan yang patut untuk dipertimbangkan, yaitu :



1. *Specific*, yaitu berarti sebuah perencanaan harus jelas apa maksud dan tujuannya beserta ruang lingkupnya.
2. *Measurable*, yaitu suatu tingkat keberhasilan yang harus dapat diukur dari program kerja dan rencana yang dibuat.
3. *Achievable*, yaitu sesuatu tersebut bisa tercapai dan diwujudkan, bukan hanya sekedar fiktif dan khayalan belaka.
4. *Realistic*, yaitu sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada, harus seimbang tetapi tetap ada tantangan didalamnya.
5. *Time*, yaitu ada batas waktu yang jelas, sehingga bisa dinilai dan dievaluasi.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian (*Organizing*) adalah fungsi kedua dalam manajemen. *Organizing* adalah proses kegiatan dalam menyusun struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil dari pengorganisasian itu berupa struktur organisasi.

Setiap tujuan sebuah organisasi pasti ingin dicapai, dan untuk meraih hal tersebut, pengorganisasian sangat berperan penting. Dalam sebuah perusahaan, pengorganisasian biasanya disusun dalam bentuk badan organisasi atau struktur organisasi, setelah itu baru dipecah menjadi beberapa jabatan. Disinilah letak salah satu prinsip manajemen yang membagi setiap tugas dan tanggung jawab dalam sebuah perusahaan yang dibebankan pada semua anggota organisasi menurut skill dan kemampuan masing-masing individu.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

*Actuating* (Pelaksanaan) adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Jadi, pelaksanaan merupakan suatu upaya yang menggerakkan

orang-orang untuk mau bekerja dengan sendirinya dan dengan kesadaran yang besar demi mengabdikan seluruh cita-cita perusahaan dengan dan secara efektif.

Perencanaan dan pengorganisasian akan berjalan kurang baik jika tidak disertai dengan pelaksanaan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sekali bentuk nyata dari kerja keras, kerjasama dan kerja nyata didalamnya. Pengoptimalan seluruh sumber daya manusia yang ada juga sangat penting, terutama ditujukan untuk mencapai visi, misi dan Planning yang telah diterapkan.

Dalam poin ini, semua sumber daya manusia yang ada harus bekerja sesuai dengan tugas yang dibebankan, fungsi serta peran dan kompetensi dari masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.

#### d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan, penentuan standar yang akan diwujudkan, menilai kinerja pelaksanaan, dan jika diperlukan mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan semaksimal mungkin dalam mencapai tujuan perusahaan. Agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka akan dibutuhkan pengontrolan yang optimal, baik itu dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi dan audit.

Tujuan utama dari kegiatan pengawasan adalah menciptakan kegiatan-kegiatan manajemen yang dinamis dan terwujud secara efektif dan efisien. Sesuai dengan perannya dalam sebuah organisasi, *controlling* memiliki beberapa fungsi utama :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan
2. Memperbaiki kelemahan dan kesalahan, serta menindak penyalahgunaan dan penyelewengan
3. Mendinamisasikan organisasi serta kegiatan dalam manajemen
4. Memperkuat rasa akan tanggung jawab tiap individu
5. Mengambil tindakan korektif jika pelaksanaan menyimpang dari Perencanaan atau standar yang telah ditetapkan.

### **3. Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Menurut (Tarigan, 2005) menyebutkan delapan perumusan tentang arti perencanaan. Empat diantaranya, yakni:

- a. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
- b. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.
- c. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
- d. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Kemudian (Conyers dan Hills dalam Arsyad, 2005) mendefenisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan definisi tersebut, (Arsyad, 2005) berpendapat terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan, yakni:

- a. Merencanakan berarti memilih
- b. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

- c. Perencanaan merupakan alat mencapai tujuan
- d. Perencanaan untuk masa depan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah proses penetapan tujuan dan perumusan langkah-langkah dengan memperhatikan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai usaha mempermudah tercapainya tujuan.

Kemudian menurut (Sitanggang, 1999) di dalam suatu proses perencanaan terdapat empat unsur pokok, yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan, adalah suatu (objek) yang ingin dicapai baik yang bersifat benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang menjadi landasan dan arah dari semua langkah dan kegiatan organisasi. Tujuan merupakan titik tolak dari semua proses perencanaan, maka harus diformulasikan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Oleh sebab itu menentukan tujuan tidak dilakukan secara mendadak tetapi ditentukan melalui tiga tahap analisis, yakni sebagai berikut:
  - 1. Bermula dari adanya keinginan yang hendak dicapai, kemudian dipertimbangkan secara berulang-ulang dengan memperhitungkan harga, waktu, resiko, dan lain-lain.
  - 2. Gagasan tersebut kemudian diletakkan sebagai tujuan yang sesungguhnya, tetapi baru bersifat hipotesis yang harus dibuktikan kelaikannya melalui analisis harga, waktu, ataupun teknologi.
  - 3. Formulasi tujuan, setelah keinginan dibuktikan kebenarannya melalui analisis, tugas selanjutnya adalah memformulasikan tujuan dan bagian-bagian pokok tujuan serta persyaratannya dengan cara sederhana dan mudah dimengerti orang lain.
- b. Data dan Informasi, data adalah keterangan atau informasi mengenai sesuatu yang di dalam perencanaan dianggap sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan dalam menentukan tujuan dan kebijakan. Data tidak hanya perlu untuk menyusun perencanaan tetapi juga pada tingkat pengendalian, penyesuaian perencanaan, dan evaluasi. Data tersebut dipisah-pisah dan dianalisis sesuai dengan keperluannya.
- c. Analisis, adalah suatu kegiatan mempelajari objek atau masalah melalui pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, bersifat internal maupun eksternal, teknis dan non teknis, vertikal dan horisontal.

- d. Kebijaksanaan, adalah ketentuan konsepsional yang bersifat menyeluruh mengenai cara dan langkah-langkah yang akan dilakukan memecahkan permasalahan atau upaya untuk mencapai tujuan. Kebijakan belum merupakan suatu patokan yang siap untuk dilaksanakan, tetapi lebih bersifat sebagai rambu-rambu pembatas mengenai arah dan syarat-syarat yang tidak dapat dilanggar. Dengan demikian kebijakan meliputi:
  - 1. Menentukan batas-batas objek atau tujuan
  - 2. Menentukan persyaratan mengenai cara yang dapat digunakan
  - 3. Memberikan ketentuan tentang hubungan keseimbangan antara tujuan dan sasaran dengan sistem yang dipakai.
  - 4. Menentukan arah dan motivasi
  - 5. Menentukan langkah-langkah prioritas

Sementara menurut (Tjokroamidjojo dalam Arifin, 2008), menyatakan bahwa unsur-unsur pokok yang menjadi komponen perencanaan, yaitu :

- a. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan, yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan.
- b. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya
- c. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan
- d. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral dan pembangunan daerah
- e. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral

T. Hani Handoko dalam (Arifin, 2008) mengemukakan dua alasan dasar perlunya perencanaan, yakni:

- a. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “*protective benefits*” yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
- b. Perencanaan dilakukan untuk mencapai “*positive benefits*” dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pembangunan, suatu perencanaan sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan tujuan dari pembangunan dengan ketersediaan dari berbagai sumber daya dan unsur-unsur terkait lainnya yang diperlukan. Perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam suatu kegiatan pembangunan yang

digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan kegiatan pembangunan. (Widodo, 2006) memberikan alasan diperlukannya perencanaan dan proses pembangunan, yakni:

- a. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menyebabkan perubahan yang sangat cepat di dalam masyarakat. Cepatnya perubahan yang dialami oleh masyarakat ini memiliki dampak tersembunyi yang bisa sangat merusak tatanan yang dimiliki oleh masyarakat.
- b. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses tersebut selesai. Dampak buruk dari sebuah proses pembangunan seringkali menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diperbaiki mengingat proses tersebut telah melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya.
- c. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya. Tanpa adanya perencanaan pembangunan yang akurat, pembangunan mungkin dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama meskipun sebenarnya pelaksanaannya dapat diselesaikan dalam waktu singkat.

Menurut Lewis dalam (Sjafrizal, 2009) perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan, dengan demikian perencanaan pembangunan menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Kemudian Jhingan dalam (Sjafrizal, 2009) memberikan definisi yang lebih konkrit tentang perencanaan pembangunan yakni merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Tjokrowinoto dalam (Arifin, 2008) memberikan makna perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut dua aspek yaitu:

- a. Sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan, berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan perencanaan tersebut.

- b. Sebagai substansi rencana pembangunan itu sendiri, berkaitan dengan isi dari rencanan pembangunan yang telah disusun.

Sedangkan menurut (Riyadi dan Supriady, 2005) mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Tjokroamidjojo dalam (Arifin, 2008) mengatakan yang menjadi ciri-ciri atau indikator sebuah perencanaan pembangunan secara umum yaitu:

- a. Merupakan suatu usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ciri ini adalah kelanjutan dari ciri yang pertama. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita.
- c. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur ekonominya lebih cenderung ke arah agraris, dan hal ini menyebabkan terdapatnya kelemahan-kelemahan konjungtural. Oleh karena itu diusahakan lebih adanya keseimbangan dalam struktur ekonomi, lebih adanya keseimbangan antara sumbangan sektor agraria terhadap produksi nasional dengan sumbangan-sumbangan sektor lain terutama industri terhadap produksi nasional.
- d. Usaha perluasan kesempatan kerja. Selain untuk menanggulangi adanya pengangguran, hal ini juga bertujuan untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi.
- e. Usaha pemerataan pembangunan (*distributive justice*). Pemerataan ini ditujukan kepada pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pembangunan antara daerah-daerah dalam negara. Hal yang penting lainnya dalam pembangunan adalah adanya

upaya menumbuhkan rasa keadilan dalam bentuk keadilan sosial (*social justice*).

- f. Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan
- g. Usaha untuk mengupayakan kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan nasional (dalam artian tidak terlalu menggantungkan terhadap pinjaman luar negeri)
- h. Usaha secara keberlanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Selanjutnya (Widodo, 2006) menyebutkan ciri yang melekat dalam perencanaan pembangunan adalah:

- a. Perencanaan yang berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat yang akan tercermin dalam pertumbuhan ekonomi yang positif.
- b. Berisi upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
- c. Berupaya untuk melakukan perubahan struktur perekonomian
- d. Bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.
- e. Terjadinya pemerataan pembangunan (*distributive justice*).

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, adapun yang menjadi tujuan dan fungsi pokok perencanaan pembangunan adalah:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, dan adil.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam kegiatan pembangunan, yang berarti dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hubungannya dengan daerah yang merupakan wilayah pembangunan muncul konsep perencanaan pembangunan daerah.



Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencanana Pembangunan Daerah dikatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Riyandi dan Supriyadi, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi berpegang pada azas prioritas. Kemudian Nugroho dalam (Arifin, 2008), menyatakan bahwa secara umum perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai proses dan mekanisme untuk merumuskan rencana jangka panjang, menengah, dan pendek di daerah yang dikaitkan pada kondisi, aspirasi, dan potensi daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka menuju kearah perkembangan yang lebih baik dengan menggunakan dan memanfaatkan

sumberdaya yang tersedia, dibatasi dalam lingkungan wilayah atau daerah dan jangka waktu tertentu.

Untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar perencanaan pembangunan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang baik serta dapat diimplementasikan di lapangan. Menurut Ryadi dan Supryadi yang dikutip dalam (Arifin, 2008), Adapun aspek-aspek tersebut, antara lain:

a. Aspek Lingkungan

Aspek lingkungan perlu diperhatikan secara serius oleh setiap perencana pembangunan. Hal ini penting karena lingkungan memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil-tidaknya program pembangunan. Pembangunan yang kurang memperhatikan masalah lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan sebagai ornamen penting dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ruang lingkupnya, aspek lingkungan dapat terbagi menjadi dua bagian, *pertama*, lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam “populasi” dimana dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan; *kedua*, lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada diluar “populasi” tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program pembangunan. Aspek-aspek lingkungan ini dapat meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, politik.

b. Aspek Potensi dan Masalah

Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap perencana dalam upaya menyusun perencanaan pembangunan daerah. Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada dilapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan, bahkan hal tersebut menjadi suatu pijakan awal dalam proses penyusunan perencanaan.

c. Aspek Institusi Perencana

Institusi perencana adalah organisasi pemerintah yang bertanggungjawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karena pembangunan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat, maka hal ini perlu dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, organisasi/institusi perencana

hendaknya dikoordinasikan oleh suatu instansi tersendiri. Hal ini penting karena perencanaan pembangunan daerah merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dilihat dari segi permasalahan maupun kebutuhan, sehingga diperlukan satu institusi yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya/ mengkoordinasikannya.

Institusi perencana harus benar-benar berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasilnya sebagai wujud pengejawantahan dari pelaksanaan manajemen pembangunan. Institusi perencana harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan kajian-kajian/analisis dalam rangka mengevaluasi hasil-hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

Dalam hal ini institusi perencana tidak hanya bertindak sebagai 'penampung' berbagai usulan/rencana dari institusi teknis lainnya, melainkan harus mampu bertindak sebagai "motor" penggerak yang dapat mengakomodir, menganalisis, menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingan-kepentingan yang berbeda menuju suatu konsensus bersama dalam wujud hasil rumusan hasil perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itulah pemahaman tentang kerangka institusi perencana menjadi sangat penting.

d. Aspek Ruang dan Waktu

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah. Oleh karena itu, sebagai suatu tahapan tentunya ia akan terikat oleh suatu dimensi yang disebut dengan dimensi ruang dan waktu. Ini berarti bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu tahapan dalam proses pembangunan memiliki keterkaitan dengan tahapan-tahapan berikutnya bahkan dapat menjadi landasan awal bagi pelaksanaan tahapan berikutnya.

Aspek ruang dan waktu harus jelas menggambarkan suatu kebutuhan dalam timing yang tepat tentang kapan perencanaan pembangunan daerah mulai disusun, kapan mulai diberlakukan, untuk berapa lama masa pemberlakuannya, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (*replanning*).

e. Aspek Legalisasi Kebijakan

Dalam perencanaan pembangunan daerah, masalah legalisasi kebijaksanaan memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Aspek ini menjadi penting ketika hasil perencanaan pembangunan daerah dipandang sebagai suatu keputusan dari suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan yang dapat mengakibatkan implikasi hukum terhadap para pelanggarnya. Dengan adanya legalisasi kebijakan terhadap hasil

perencanaan pembangunan daerah, implementasinya harus sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersendiri. Hal ini penting untuk menghindari atau meminimalkan *ekses* yang timbul sebagai dampak sebagai suatu proses pembangunan.

Selanjutnya menurut Blakely dalam (Widodo, 2006), ada enam tahapan dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang meliputi:

- a. Pengumpulan dan analisis data.
- b. Pemilihan strategi pembangunan daerah.
- c. Pemilihan proyek-proyek pembangunan.
- d. Pembuatan rencana tindakan.
- e. Penentuan perincian proyek.
- f. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi.

**Tabel 3. Proses Perencanaan Pembangunan Daerah**

Tahap	Tugas
I	Pengumpulan dan Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan basis ekonomi</li> <li>b. Analisis struktur tenaga kerja</li> <li>c. Evaluasi kebutuhan tenaga kerja</li> <li>d. Analisis peluang dan kendala pembangunan</li> <li>e. Analisis kepastian kelembagaan</li> </ol>
II	Pemilihan strategi pembangunan daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penentuan tujuan dan kriteria</li> <li>b. Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan</li> <li>c. Penyusunan target strategi</li> </ol>
II	Pemilihan proyek-proyek pembangunan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identifikasi proyek potensial</li> <li>b. Penilaian kelayakan proyek</li> </ol>
IV	Pembuatan rencana tindakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prapenilaian hasil proyek</li> <li>b. Pengembangan input proyek</li> <li>c. Penentuan alternatif sumber pembiayaan</li> <li>d. Indentifikasi struktur proyek</li> </ol>

V	Penentuan perincian proyek: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan studi kelayakan secara terperinci</li> <li>Penyiapan rencana bisnis (<i>Business Plan</i>)</li> <li>Pengembangan, pengawasan, dan penilaian program</li> </ol>
VI	Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Persiapan jadwal implementasi rencana proyek</li> <li>Penyusunan rencana program pembangunan secara keseluruhan</li> <li><i>Targeting</i> dan <i>marketing</i> aset-aset masyarakat</li> <li>Pemasaran kebutuhan keuangan</li> </ol>

Sumber: Blakely dalam (Kuncoro, 2009)

Selanjutnya Munir dalam (Widodo, 2006) mengelompokkan beberapa macam perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

- Berdasarkan jangka waktu:
  - Perencanaan jangka panjang (perspektif), yakni biasanya mempunyai rentang waktu antara 10-25 tahun.
  - Perencanaan jangka menengah, yakni berkaitan dengan tujuan yang hendak di capai dalam jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu 4-6 tahun.
  - Perencanaan jangka pendek, yakni mempunyai rentang waktu satu tahun, perencanaan ini sering disebut juga perencanaan operasional tahunan.
- Berdasarkan alokasi sumber daya:
  - Perencanaan keuangan, yaitu merupakan teknik perencanaan yang berkaitan dengan pengalokasian dana (uang). Keuangan merupakan kunci pokok implementasi perencanaan ekonomi.
  - Perencanaan fisik, yaitu usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian faktor-faktor produksi dan hasil produksi sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan.
- Berdasarkan arus informasi:
  - Perencanaan sentralistik (*top-down*), yakni keseluruhan proses perencanaan suatu negara berada di bawah badan perencana pusat. Badan perencana pusat mengendalikan setiap aspek pembangunan, menetapkan harga semua produk dan upah tenaga kerja.
  - Perencanaan desentralistik (*bottom-up*), yakni mengacu pada proses pelaksanaan rencana dari bawah. Rencana pada dasarnya dirumuskan oleh badan perencana pusat setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi negara, dengan memperhatikan

secara cermat rencana daerah. rencana pada tingkat daerah memperhatikan potensi dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat.

- d. Berdasarkan tingkat keluwesan:
  1. Perencanaan indikatif, yakni perencanaan yang bersifat luwes, pemerintah memberikan ransangan dan pedoman kepada sektor swasta.
  2. Perencanaan imperatif, yakni semua kegiatan dan sumber daya ekonomi berjalan menurut komando negara. Adanya pengawasan menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi.
- e. Berdasarkan sistem ekonomi:
  1. Perencanaan dalam kapitalisme, yakni tidak difokuskan pada perencanaan yang terpusat, alat-alat produksi bisa dimiliki secara pribadi, harga ditentukan oleh kekuatan pasar.
  2. Perencanaan dalam sosialisme, yakni direncanakan pada rencana yang terpusat, dalam arti ada penguasa atau badan perencanaan yang terpusat yang merumuskan rencana secara keseluruhan.
  3. Perencanaan dalam ekonomi campuran, yakni sistem perencanaan yang membagi sektor perekonomian ke sektor pemerintah dan sektor swasta.
- f. Berdasarkan sifat perencanaan
  1. Perencanaan dengan komando, yakni perencanaan yang menuntut adanya liberalisme. Pada sistem ini pemerintah pusat merencanakan, mengatur, dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.
  2. Perencanaan dengan ransangan, yakni sistem perencanaan yang demokratis. Sistem ini dilakukan dengan cara memanipulasi pasar. Ada kebebasan berusaha, kebebasan berkonsumsi, dan kebebasan memproduksi.
- g. Berdasarkan dimensi pendekatan:
  1. Perencanaan makro, didefinisikan sebagai perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro.
  2. Perencanaan sektoral, yakni merupakan perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan.
  3. Perencanaan regional, yakni perencanaan yang menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan.
  4. Perencanaan mikro, didefinisikan sebagai perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan pelaksanaannya.

### C. Rencana Strategi (RENSTRA)

Setiap manusia mempunyai rencana yang berbeda-beda dalam menjalankan kehidupan, bukan hanya itu setiap organisasi juga memiliki rencana yang matang untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Rencana adalah cara spesifik yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan. Manfaat rencana ini agar tujuan dari kegiatan yang di lakukan dapat tercapai dengan yang diharapkan, yang mempunyai kriteria spesifik, dapat di capai, relevan dengan masalah yang ingin di atasi dan mempunyai jangka waktu dalam pelaksanaannya.

Konsep perencanaan menurut Koontz dan O'Donnel dalam (Purwanto, 2007) yaitu:

*“planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programs.* Terjemahannya kurang lebih yaitu Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, program-program dari alternatif-alternatif yang ada”.

Syarat-syarat rencana yang baik menurut (Purwanto, 2007) antara lain :

1. Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
2. Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data dan fakta.
3. Menetapkan beberapa alternative dan premisnya.
4. Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana yang Rasional, mudah dipahami, dapat dikerjakan, fleksibel, berkesinambungan dalam urutan dan waktu pencapaiannya.

Rencana yang baik memerlukan beberapa langkah-langkah yang dikemukakan oleh (Purwanto, 2007) adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan serta merumuskan dahulu masalah/usaha/tujuan yang akan direncanakan itu.
2. Mengumpulkan data,informasi dan fakta yang diperlukan secukupnya.

3. Menganalisis dan mengklarifikasi informasi, serta hubungan-hubungannya.
4. Menetapkan perencanaan, premis-premis dan hambatan-hambatan serta hal-hal yang mendorongnya.
5. Menentukan beberapa alternative.
6. Pemilihan keputusan yang terbaik dari alternative-alternatif yang ada.
7. Tetapkanlah urutan-urutan dan penetapan waktu secara terperinci bagi rencana yang diusulkan.
8. Laksanakan pengecekan tentang kemajuan rencana yang diusulkan.

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dijelaskan bahwa "perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia". Pengertian perencanaan juga terdapat dalam PP No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, pengertian perencanaan sama dengan yang terdapat pada UU No.25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani *strategos*, atau *strategos* dengan kata jamak strategi. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam Yunani Kuno sering berarti perwira Negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of ten strategy* di Athena, mewakili 10 suku di Yunani (Salusu, 1998). Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Siagian dalam (Akdon, 2007) mengartikan Strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka penacapaian tujuan organisasi tersebut.



Sedangkan menurut (Salusu, 1998) Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapa dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

Pemimpin memfokuskan organisasi mereka pada arah strategi. Mereka menciptakan agenda mereka untuk perubahan startegis. Pemimpin organisasi menjaga kemajuan organisasi menuju visi strategi. Pemimpin-pemimpin strategi dalam sektor publik modern memberdayakan para manajer dan karyawan mereka untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik (Gaspersz, 2004).

Strategi yang digunakan dalam suatu organisasi diungkapkan oleh Shirley dalam (Salusu, 1998) pada umumnya membahas mengenai :

1. Tujuan dan sasaran yang digunakan.
2. Lingkungan
3. Kemampuan internal
4. Kompetisi
5. Pembuat strategi
6. Komunikasi

Tipe-tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi menurut (Salusu, 1998) yaitu :

1. *Corporate Strategy* (Strategi organisasi).
2. *Program Strategy* (Strategi program).
3. *Resource Support Strategy* (strategi pendukung sumberdaya).
4. *Intitutional Strategy* (Strategi kelembagaan).

Prinsip-prinsip untuk menyukkseskan strategi diungkapkan oleh Hatten dan Hatten dalam (Salusu, 1998) suatu organisasi yang dibuat harus memiliki petunjuk bagaimana organisasi itu bisa sukses yaitu melalui :

1. Strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya.
2. Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi.
3. Strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan yang lain.
4. Strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatannya dan tidak pada titik-titik yang justru adalah kelemahannya. Sumber daya adalah suatu yang kritis.
5. Strategi hendaknya memperhitungkan risiko yang tidak terlalu besar.
6. Strategi hendaknya disusun di atas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
7. Tanda-tanda dari suksesnya strategi ditampakkan dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para eksekutif, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi.

Maka dalam strategi diperlukan suatu pemimpin yang di bantu oleh para pegawainya dalam membuat keputusan untuk suatu strategi yang akan dilakukan. Strategi ini dapat merespon terhadap harapanharapan masyarakat yang akan menelaah terhadap suatu situasi yang akan langsung berhubungan dengan kepentingan banyak orang atau masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Istilah perencanaan strategi mulai digunakan pada tahun 1960-an dan menjadi paradigma *alternative* dalam bidang perencanaan, menggantikan model perencanaan lama. Perencanaan strategi menjadi sangat penting manakala organisasi menghadapi perubahan-perubahan lingkungan yang tidak menentu karena gagalnya model perencanaan jangka panjang dalam memprediksi situasi yang cepat berubah dan tidak pasti. Keadaan tersebut menyadarkan organisasi untuk menerapkan suatu perencanaan yang fleksibel, mampu memprediksi lingkungan yang cepat berubah, serta dapat berjalan seiring dengan ketidakpastian keadaan. Konsep perencanaan strategi memfokuskan pada perencanaan bidang-bidang strategi dan tidak perlu

melakukan semua hal sehingga perencanaan harus dilakukan dengan cermat, tepat dan matang.

Perencanaan / Rencana Strategi (RENSTRA / *strategy planning*), yang merupakan bagian pertama dari manajemen strategi, mencakup penetapan tujuan, sasaran dan strategi organisasi. Strategi organisasi berisi tentang kebijakan, program dan kegiatan organisasi (Muljadi, 2006).

Menurut pendapat (Salusu, 1998) Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk mengurangi risiko, suatu instrumen untuk mendidik para manajer, para pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-kepala unit kerja selain itu pula adalah suatu proses dalam membuat keputusan strategi atau menawarkan metode untuk memformulasikan dan mengimplementasikan keputusan strategi, serta mengalokasikan sumber daya untuk mendukungnya semua unit kerja dan tingkatan dalam organisasi. Perencanaan strategi juga dapat diartikan sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan mereka mempunyai dampak terhadap masa depan organisasi dengan cara yang konsisten dan rasional.

Perencanaan strategi bagi pemerintah daerah dapat dipandang sebagai suatu yang dapat digunakan oleh para pemimpin pemerintahan untuk membayangkan, memvisualisasikan masa depan organisasi pemerintahannya, kemudian mengembangkan struktur, staf, produser, operasionalisasi, serta pengendalian sehingga secara gemilang mampu mencapai masa depan yang diinginkan itu. (Salusu, 1998).

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh John C. Camillus, (1986) sebagai berikut:

*Strategy planning systems differ in the extent to which they emphasize creativity as opposed to control, it has been stressed that these two somewhat opposed orientations need to be balanced in order to enhance the effectiveness of a system. (International Journal of Strategy Planning a Discriminant Analysis Approach, 349).*

Terjemahannya kurang lebih, Sistem Perencanaan Strategi berbeda tingkat dimana mereka menitikberatkan pengawasan kreatifitas sebagai Lawan, itu mempunyai penekanan bahwa apa kebalikan dua dari beberapa lawan orientasi-orientasi ini memerlukan untuk jadi seimbang dalam menambahkan keefektifan dari sebuah sistem.

Perencanaan strategi dalam setiap organisasi harus bersifat responsif terhadap segala bentuk perubahan lingkungan organisasi yang terjadi. Apabila perencanaan strategi itu kurang responif, maka organisasi yang bersangkutan akan kesulitan menentukan visi dan misi bahkan tujuan organisasi sekalipun. Perencanaan strategi merupakan suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien sampai pada implementasi paling depan sampai pada tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan (Muljadi, 2006).

Menurut beberapa penulis (Steiner, 1979; Barry, 1986; Freeman, dan Roering, 1986; Bryson, Van de Ven, dan roaring, 1987) bahwa rencana strategi dapat membantu suatu organisasi:

1. Berfikir secara strategi dan mengembangkan strategi yang efektif.
2. Memperjelas arah masa depan.
3. Menciptakan prioritas

4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa depan.
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan.
6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidangbidang yang berada di bawah kontrol organisasi.
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.
8. Memecahkan masalah organisasi.
9. Memperbaiki kinerja organisasi.
10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif.
11. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Namun mereka menegaskan bahwa meskipun rencana strategi dapat memberikan seluruh manfaat di atas, tidak ada jaminan semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan strategi hanyalah kumpulan konsep, prosedur dan alat. Jadi perencana perlu bersikap sangat hati-hati karena tidak semua pendekatan memiliki kegunaan yang sama, dan beberapa persyaratan tertentu dapat mempengaruhi keberhasilan penggunaan masing-masing pendekatan.

Konsep kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Barry dalam (Salusu, 1998) perencanaan strategi baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lain yang tidak menggunakan perencanaan strategi. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas misi dan visi strategi yang jelas. Misi dan visi strategi itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Dalam hal organisasi kekurangan dana karena menurunnya bantuan dari luar, perencanaan strategi dapat mencari jalan keluar, misalnya mengurangi biaya, mencari sumber lain, dan melakukan penggabungan. Menurut (salusu, 1998) untuk bisa mencari jalan keluar, tim perencanaan perlu diperkuat, atau kalau belum ada, hendaknya dibentuk dengan anggota yang terdiri dari pejabat-pejabat kunci dan

beberapa staff lain yang dipandang perlu. Anggota-anggota tim atau badan perencanaan itu makin lama memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam menaggulangi masalah-masalah yang sering tidak diantisipasi.

Perencanaan strategi tidak selalu dapat memberi nasihat ini disampaikan oleh (Bryson, 2008), karena adanya dua alasan yang memaksa bertahan pada upaya perencanaan strategi yaitu :

1. Perencanaan strategi tidak hanya menjadi langkah pertama yang terbaik bagi organisasi rumpun atapnya.
2. Perencanaan startegi akan menjadi kegiatan yang buang-buang waktu saja jika organisasi tidak memiliki ketrampilan, sumber daya atau komitmen para pembuat keputusan guna menghasilkan rencana yang baik.

Agar mencapai hasil-hasil yang diharapkan, manajemen dan karyawan harus memiliki komitmen terhadap perencanaan strategi dan memberikan perhatian penuh pada implementasi dari sasaransasaran dan tujuan-tujuan pernyataan ini dikemukakan menurut (Gaspersz, 2004), Beliau juga mengemukakan mengenai manfaat perencanaan strategi antara lain:

1. Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan dinamik yang komplek.
2. Berguna untuk pengelolaan hasil-hasil (*Managing for result*).
3. Perencanaan strategi merupakan suatu alat manajerial yang penting.
4. Perencanaan strategi berorientasi masa depan.
5. Perencanaan strategi mampu beradaptasi (*adaptable*).
6. Perencanaan strategi adalah penting untuk mendukung pelanggan.
7. Perencanaan strategi mempromosikan komunikasi.

Kriteria lain mengenai keuntungan Perencanaan strategi disampaikan oleh (Nugroho dalam Handou, 2008) mengenai memulai perencanaan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Persebaran pemikiran strategi melalui tindakan.
2. Mengubah Pengambilan kebijakan
3. Meningkatkan responsivitas kinerja organisasi

Sedangkan menurut (Robbins dan Coulter, 1999), ada empat alasan dan manfaat perlunya perencanaan strategi yaitu :

1. Perencanaan strategi memberi arah.
2. Perencanaan strategi mengurangi dampak perubahan.
3. Perencanaan strategi memperkecil pemborosan.
4. Perencanaan strategi menentukan standar pengendalian.

Jika perencanaan strategi dilakukan dalam situasi apapun di dalam organisasi harus merupayakan keputusan yang terfokus dan terbatas sesuai dengan keadaan yang bertujuan mengembangkan ketrampilan, sumber daya dan komitmen yang diperlukan.

Perencanaan strategi yang merupakan bagian pertama dari manajemen strategi mencakup penetapan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi. Strategi organisasi berisi kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Semua hal tersebut merupakan kelanjutan dari tahap manajemen strategi sebelumnya, sebelum penetapan tujuan organisasi, yaitu penetapan urutan asumsi strategi pilihan atau faktor kunci keberhasilan (FKK). Kemudian setiap FKK dirinci lebih lanjut penjabarannya menjadi beberapa tujuan, dan tiap tujuan dijabarkan menjadi beberapa tahapan sasaran, dan kemudian tiap sasaran memiliki beberapa strategi yang dituangkan rinciannya dalam beberapa kebijakan, beberapa program dan beberapa kegiatan organisasi (Muljadi, 2006). Setiap langkah dalam rencana strategi perlu dipikirkan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat di aplikasikan ini dikemukakan oleh (Gaspersz, 2004) yang nantinya sangat berguna dalam melaksanakan misi organisasi yang telah ditetapkan. Perlu dipahami apabila

suatu organisasi gagal membuat rencana, maka sebenarnya organisasi tersebut telah merencanakan suatu kegagalan. Oleh karena itu konsep perencanaan strategi harus diusahakan dengan sebaik-baiknya.

Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Jane E. Dutton and Robert B. Duncan, sebagai berikut:

*The Strategy planning process is defined as the set of human interactions, formal and informal that take place in the course of generating a strategy plan. For the purposes of the discussion below the focus will be on corporate level as opposed to business or functional level planning. Strategy planning process serves as a type of performance program absorbing uncertainty by reducing the information load facing decision makers. Through the planning process, information critical to the organizations survival is received and interpreted. Signals are received in the form of informational inputs, e.g. data on internal actions such as personnel changes, capital requirements, etc. or external actions such as competitor moves, regulatory changes. etc. formally or informally, this process produces the array of strategy issues that have been earmarked as significant for the organizations future. (International Journal of Strategy Planning Process on Strategy Change, 105-106).*

Terjemahannya kurang lebih, Proses perencanaan strategi ditentukan sebagai kumpulan dari interaksi-interaksi manusia formal dan informal itu terjadi dalam perjalanan dari penghasilan sebuah rencana strategi. Untuk tujuan-tujuan dari focus diskusi di bawah akan terjadi tingkat diatas kerja sama sebagai lawan untuk urusanurusan atau tingkat perencanaan fungsional. Proses perencanaan strategi disajikan sebagai sebuah tipe dari penyerapan tampilan program tidak pasti oleh pengurangan beban informasi dihadapan pembuat keputusan. Antara proses perencanaan informasi penting untuk ketahanan organisasi yang diterima dan diungkapkan. Tanda-tanda yang diterima dalam bentuk masukan-masukan yang bersifat informasi misalnya data dalam tindakan-tindakan internal seperti pergantian



anggota, penerimaan capital, dll. Tindakan external seperti langkah-langkah pesaing, perubahan peraturan, dll. Secara formal atau informal proses ini menghasilkan pameran dari persoalan-persoalan strategi itu merupakan cirri yang signifikan untuk masa depan organisasi.

Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana regulasi tersebut juga mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan pada UU tersebut dan amanat UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RPJMD.

Pada PP No.8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah, Rencana pembangunan daerah meliputi :

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Perencanaan dimulai dengan adanya informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan nasional. Dalam memulai suatu rencana strategi diperlukan suatu perencanaan adapun ruang lingkup Perencanaan Daerah Menurut (Dadang Solihin, 2005) yaitu sebagai berikut disertai dengan penjelasan penetapan

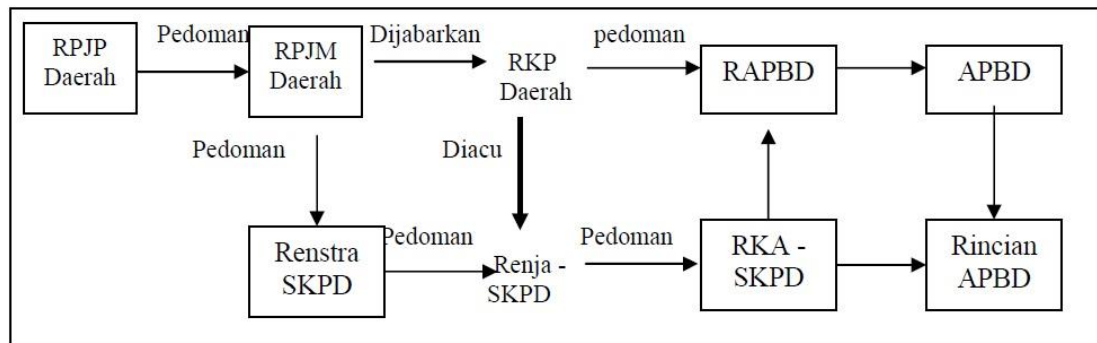
yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional :

1. Rencana Pembangunana Jangka Daerah (RPJP-Daerah)  
RPJP-Daerah ini terdapat pada penetapan Perda pasal 13 ayat 2 : RPJP Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)  
RPJM Daerah ini teradapat pada Peraturan KDH pasal 19 ayat 3 yaitu : RPJMD ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala daerah dilantik.
3. RENSTRA SKPD  
Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah setelah disesuaikan dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada 19 ayat 3. menurut PP no 8 tahun 2008 renstra SKPD ini memuat tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
RKPD ditetapkan oleh Peraturan Kepala Daerah KDH
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)  
Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan Renja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 yaitu kepala bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. Dan berpedoman pada Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 4.  
(www.dadangsolihin.com)

Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu :

1. Strategi Pembangunan Daerah
2. Kebijakan umum
3. Arah Kebijakan Keuangan daerah
4. Programm SKPD, lintas SKPD kewilayahan dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam kerangka regulasi dan Kerangka anggaran.  
(Dadang Solihin, 2005)

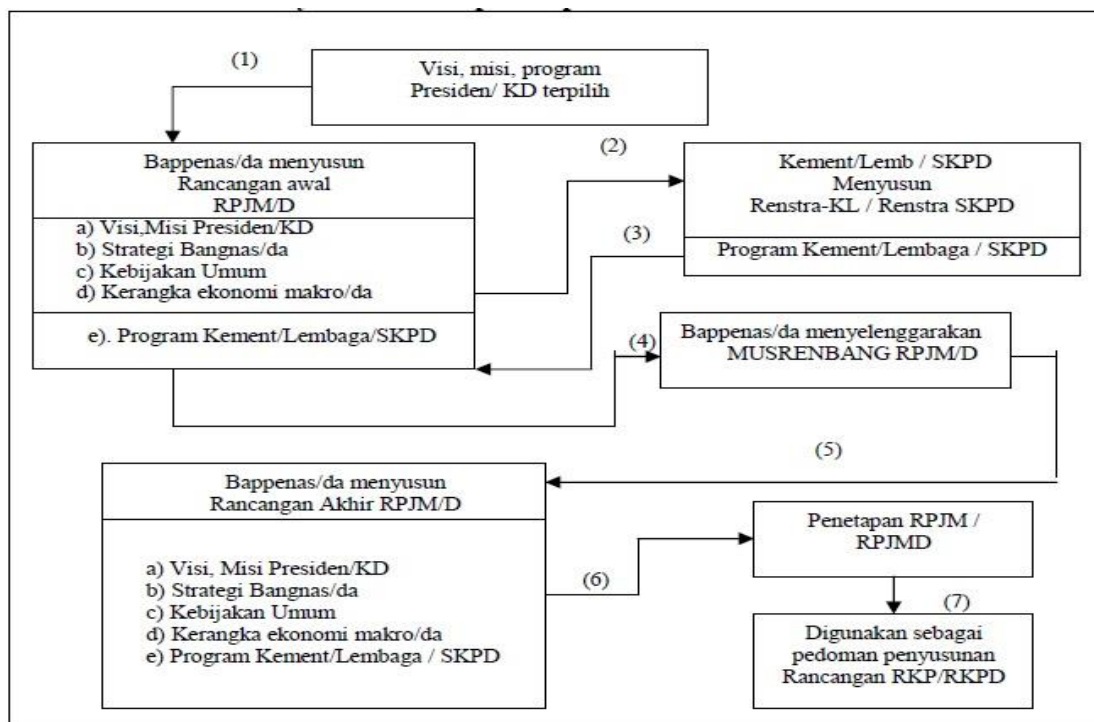
Dibawah ini akan dijabarkan mengenai alur perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan oleh (Dadang Solihin, 2005) yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah**

Sumber : (Dadang Solihin, 2005).

Penyusunan dan penetapan RPJM dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



**Gambar 2. Penyusunan dan Penetapan RPJM**

Sumber: (Dadang Solihin, 2005)

Jadi, rencana strategi merupakan satuan kerja yang dilakukan oleh suatu instansi atau dinas dan suatu perusahaan berisikan mengenai visi, misi, kebijakan,

program dan kegiatan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan tujuan mengembangkan ketrampilan, sumber daya dan komitmen yang diperlukan dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melangkah mencapai tujuan akhir organisasi.

#### **D. Kewirausahaan**

##### **1. Pengertian Kewirausahaan**

Cantillon dalam (Leonardus Saiman, 2014) Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari *entrepreneurship* dalam bahasa Inggris. Kata *entrepreneurship* sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Prancis, yaitu “*entreprendre*” yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha, Istilah ini diperkenalkan oleh. Jika dipahami dengan menguraikan istilah wirausaha berasal dari kata „wira“ yang berarti utama, gagah, luhur, berani, teladan dan pejuang. Sedangkan usaha berarti penciptaan kegiatan, dan atau berbagai aktivitas bisnis.

Schumpeter dalam (Lupioyadi, 2007), menyatakan bahwa wirausaha adalah pelaku utama dalam pembangunan ekonomi dan fungsinya adalah untuk melakukan inovasi, atau menciptakan kombinasi-kombinasi baru. Menurut Lambing dan Kehl dalam (Hendro, 2005), kewirausahaan adalah suatu usaha kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh banyak orang.

Scarborough dan Zimmerer dalam (Suryana, 2013) mengemukakan:

*“An Entrepreneur is one who creates a new business in the face of risk and uncertainty for the purpose of achieving profit and growth by identifying opportunities and assembling the necessary resources to capitalize on opportunities”* “Seorang pengusaha adalah orang yang menciptakan bisnis

baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk tujuan Mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang dan perakitan sumber daya Diperlukan untuk memanfaatkan peluang”.

Kemudian menurut (Meredith, 1996), berwirausaha berarti memadukan perwatakan pribadi, keuangan, dan sumber daya, oleh karena itu, berwirausaha merupakan sebuah pekerjaan atau karier yang harus bersifat fleksibel, dan imajinatif, mampu merencanakan, mengambil resiko, mengambil keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Instruksi Presiden No.4 Tahun 1995; kewirausahaan adalah semangat sikap, perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah kepada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kamus Umum Bahasa Indonesia dalam (Winarno, 2011) mengartikan wirausaha sebagai Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri, mandiri dan merdeka dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada memperoleh keuntungan untuk diri sendiri secara kreatif dalam menciptakan peluang dan usaha dengan value yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

## 2. Wirausaha

Kata *entrepreneur* atau wirausaha dalam bahasa Indonesia merupakan gabungan dari *wira* (gagah, berani, perkasa) dan *usaha* (bisnis) sehingga istilah *entrepreneur* dapat diartikan sebagai orang yang berani atau perkasa dalam usaha/bisnis.

Menurut Joseph Schumpeter dalam (Hamdani, 2012) wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru.

Secara sederhana arti wirausaha (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil risiko artinya bermental mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti.

Dalam Wikipedia, *entrepreneur* adalah *an owner or manager of a business enterprise who makes money through risk and initiative*. Artinya, pemilik atau manager sebuah perusahaan bisnis yang menghasilkan keuntungan melalui pengambilan risiko dan tindakan inisiatif. Secara konseptual, seorang wirausahawan dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang dan konteks sebagai berikut:

### a. Wirausaha Ahli

Wirausaha ahli atau seorang penemu memiliki suatu ide yang ingin mengembangkan proses produksi sistem produksi, dan sebagainya.

Wirausaha ahli ini biasanya seseorang yang bekerja pada sebuah

perusahaan besar kemudian memutuskan untuk keluar sebagai pegawai dan memulai bisnisnya sendiri.

b. The Promoter

The promoter adalah seorang individu yang tadinya mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai sales atau bidang marketing yang kemudian mengembangkan perusahaan sendiri.

c. General Manager

General manager adalah seorang individu yang ideal yang secara sukses bekerja pada sebuah perusahaan, dia banyak menguasai keahlian bidang produksi, pemasaran, permodalan dan pengawasan

Berdasarkan uraian di atas istilah entrepreneur mempunyai arti yang berbeda pada setiap orang karena mereka melihat konsep ini dari berbagai sudut pandang. Namun demikian ada beberapa aspek umum yang terkandung dalam pengertian entrepreneur yaitu adanya unsur risiko, kreativitas, efisiensi, kebebasan dan imbalan. Menurut (Ciputra, 2008) terdapat empat kategori entrepreneur, yaitu sebagai berikut:

a. Business Entrepreneur

1. Owner entrepreneur adalah para pencipta dan pemilik bisnis.
2. Professional entrepreneur adalah orang-orang yang memiliki daya wirausaha namun mempraktikannya di perusahaan milik orang lain.

b. Government Entrepreneur

Seorang atau kelompok orang yang memimpin serta mengelola lembaga negara atau instansi pemerintahan dengan jiwa dan kecakapan wirausaha. Sebagai contoh adalah Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, ia adalah seorang pemimpin yang mengelola dan menumbuhkan Singapura dengan jiwa dan kecakapan wirausaha.

c. Social Entrepreneur

Yaitu para pendiri organisasi-organisasi sosial kelas dunia yang menghimpun dana masyarakat untuk melaksanakan tugas sosial yang mereka yakini.

d. Academic Entrepreneur

Ini menggambarkan akademisi yang megajar atau mengelola lembaga pendidikan dengan pola dan gaya entrepreneur sambil tetap menjaga tujuan mulia pendidikan.

### 3. Karakteristik Kewirausahaan

Scarborough dan Zimmerer dalam (Suryana, 2013) terdapat delapan karakteristik kewirausahaan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Rasa tanggung jawab (*desire for responsibility*), yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya, yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya.
- b. Memiliki risiko yang moderat (*preference for moderate risk*), yaitu lebih memilih risiko yang moderat, artinya selalu menghindari risiko, baik yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
- c. Percaya diri terhadap kemampuan sendiri (*confidence in their ability to success*), yaitu memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh kesuksesan.
- d. Menghendaki umpan balik segera (*desire for immediate feedback*), yaitu selalu menghendaki adanya unsur timbal balik dengan segera, ingin cepat berhasil.
- e. Semangat dan kerja keras (*high level of energy*), yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.
- f. Berorientasi ke depan (*future orientation*), yaitu berorientasi masa depan dan memiliki perspektif dan wawasan jauh ke depan.
- g. Memiliki kemampuan berorganisasi (*skill at organization*), yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.
- h. Menghargai prestasi (*value of achievement over money*), yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang.

Sedangkan, menurut Bygrave dalam karakteristik wirausahawan meliputi 10

D, sebagai berikut:



- a. *Dream*, yaitu seorang wirausaha mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya.
- b. *Decisiveness*, yaitu seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka membuat keputusan secara cepat dengan penuh perhitungan.
- c. *Doers*, yaitu seorang wirausaha dalam membuat keputusan akan langsung menindaklanjuti. Mereka melaksanakan kegiatannya secepat mungkin dan tidak menunda-nunda kesempatan yang baik dalam bisnisnya.
- d. *Determination*, yaitu seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian. Rasa tanggung jawabnya tinggi dan tidak mau menyerah, walaupun dihadapkan pada halangan dan rintangan yang tidak mungkin dapat diatasi.
- e. *Dedication*, yaitu seorang wirausaha dedikasi terhadap bisnisnya sangat tinggi.
- f. *Devotion*, yaitu mencintai pekerjaan bisnisnya dan produk yang dihasilkan.
- g. *Details*, yaitu seorang wirausaha sangat memerhatikan faktor-faktor kritis secara rinci.
- h. *Destiny*, yaitu bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau tergantung kepada orang lain.
- i. *Dollars*, seorang wirausaha tidak mengutamakan mencapai kekayaan, motivasinya bukan karena uang.
- j. *Distribute*, yaitu bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang kepercayaan yaitu orang-orang yang kritis dan mau diajak untuk mencapai sukses dalam bidang bisnis.

Menurut (Marbun, 1993) seorang wirausahawan haruslah seorang yang mampu melihat ke depan. Melihat ke depaan bukan melamun kosong, tetapi melihat berfikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan pemecahannya. Dari berbagai penelitian di Amerika Serikat, untuk menjadi wirausahawan, seseorang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

**Tabel 4. Ciri-ciri dan Sifat Wirausaha**

No	Ciri-ciri	Watak
1	Percaya Diri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepercayaan (keteguhan)</li> <li>• Ketidaktergantungan, kepribadian mantap</li> <li>• Optimisme</li> </ul>
2	Berorientasikan tugas dan hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan atau haus akan prestasi</li> <li>• Berorientasi laba atau hasil</li> <li>• Tekun dan tabah</li> <li>• Tekad, kerja keras, motivasi</li> <li>• Energik</li> <li>• Penuh inisiatif</li> </ul>
3	Pengambil risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu mengambil resiko</li> <li>• Suka pada tantangan</li> </ul>
4	Kepemimpinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu memimpin</li> <li>• Dapat bergaul dengan orang lain</li> <li>• Menanggapi saran dan kritik</li> </ul>
5	Keorisinilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovatif (pembaharu)</li> <li>• Kreatif</li> <li>• Fleksibel</li> <li>• Banyak sumber</li> <li>• Serba bisa</li> <li>• Mengetahui banyak</li> </ul>
6	Orientasi masa depan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pandangan ke depan</li> <li>• Perseptif</li> </ul>

*Sumber: Buchari Alma (2013)*

Menurut Lambing dan Kehl dalam (Hendro, 2005) kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Katanya, setiap wirausahawan (*entrepreneur*) yang sukses memiliki empat unsur pokok, yaitu:

- a. Kemampuan (hubungan dengan IQ dan skill)
  - 1) Dalam membaca peluang
  - 2) Dalam berinovasi
  - 3) Dalam mengelola
  - 4) Dalam menjual

- b. Keberanian (hubungan dengan EQ dan mental)
  - 1) Dalam mengatasi ketakutannya
  - 2) Dalam mengendalikan risiko
  - 3) Untuk keluar dari zona kenyamanan
- c. Keteguhan hati (hubungan dengan motivasi diri)
  - 1) Persistence (ulet), pantang menyerah
  - 2) Determinasi (teguh akan keyakinannya)
  - 3) Kekuatan akan pikiran (*power of mind*) bahwa Anda bisa
- d. Kreativitas yang menelurkan sebuah inspirasi sebagai cikal bakal ide untuk menemukan peluang berdasarkan intuisi (hubungan dengan *experiences*).

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa dasarnya karakteristik seorang wirausaha ialah kreatifitas. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa seorang wirausaha dapat dibentuk dan dipelajari, bukan lahir dengan sendirinya.

#### **4. Pembelajaran Kewirausahaan**

Kewirausahaan merupakan jiwa dari seseorang yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku yang kreatif dan inovatif untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan demikian, perlu ditegaskan bahwa tujuan pembelajaran kewirausahaan sebenarnya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pebisnis atau *business entrepreneur*, tetapi mencakup seluruh profesi yang didasari oleh jiwa wirausaha atau entrepreneur.

Dalam pengertian yang paling luas, pembelajaran terjadi ketika pengalaman menyebabkan perubahan yang relatif permanen pada pengetahuan atau perilaku individu. Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan.

Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih

kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi (*transfer*) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ilmu pengetahuan telah dan akan terus berkembang dengan sangat cepat pada abad ini. Perkembangan ini sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita termasuk dalam pekerjaan yang ada. Secara umum, mata pelajaran wirausaha sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Selanjutnya, agar kita dapat memahami jiwa dan semangat kewirausahaan, terlebih dahulu harus mengetahui pengertian yang berkenaan dengan kewirausahaan dan wirausaha.

Trianto (2010) Pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Dari makna ini jelas terlihat bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, di mana antara keduanya terjadi komunikasi (*transfer*) yang intens dan terarah menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kegiatan disadari atau tidak mempunyai tujuan, apalagi kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, 1991), tujuan berarti arah atau maksud. Sementara itu maksud diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki sebagaimana telah disebutkan bahwa arah proses kewirausahaan dimulai dari imitasi dan duplikasi. Sedangkan hasil akhir yang ingin dicapai dari pembelajaran kewirausahaan ialah tertanam atau terbentuknya jiwa wirausaha pada diri seseorang, sehingga yang bersangkutan menjadi seorang wirausaha dengan kompetensinya. Inti dari kompetensi seorang wirausaha ialah inovatif dan kreatif.

Dalam konteks yang relatif lebih luas (Astim, 2000) mengemukakan; Pendidikan kewirausahaan merupakan semacam pendidikan yang mengajarkan agar orang mampu menciptakan kegiatan usaha sendiri. Pendidikan semacam itu ditempuh dengan cara:

- a. membangun keimanan, jiwa dan semangat
- b. membangun dan mengembangkan sikap mental dan watak wirausaha
- c. mengembangkan daya pikir dan cara berwirausaha
- d. memajukan dan mengembangkan daya penggerak diri
- e. mengerti dan menguasai teknik-teknik dalam menghadapi risiko, persaingan dan suatu proses kerjasama
- f. mengerti dan menguasai kemampuan menjual ide
- g. memiliki kemampuan kepengurusan atau peneglolaan
- h. serta mempunyai keahlian tertentu termasuk penguasaan bahasa asing tertentu untuk keperluan komunikasi.

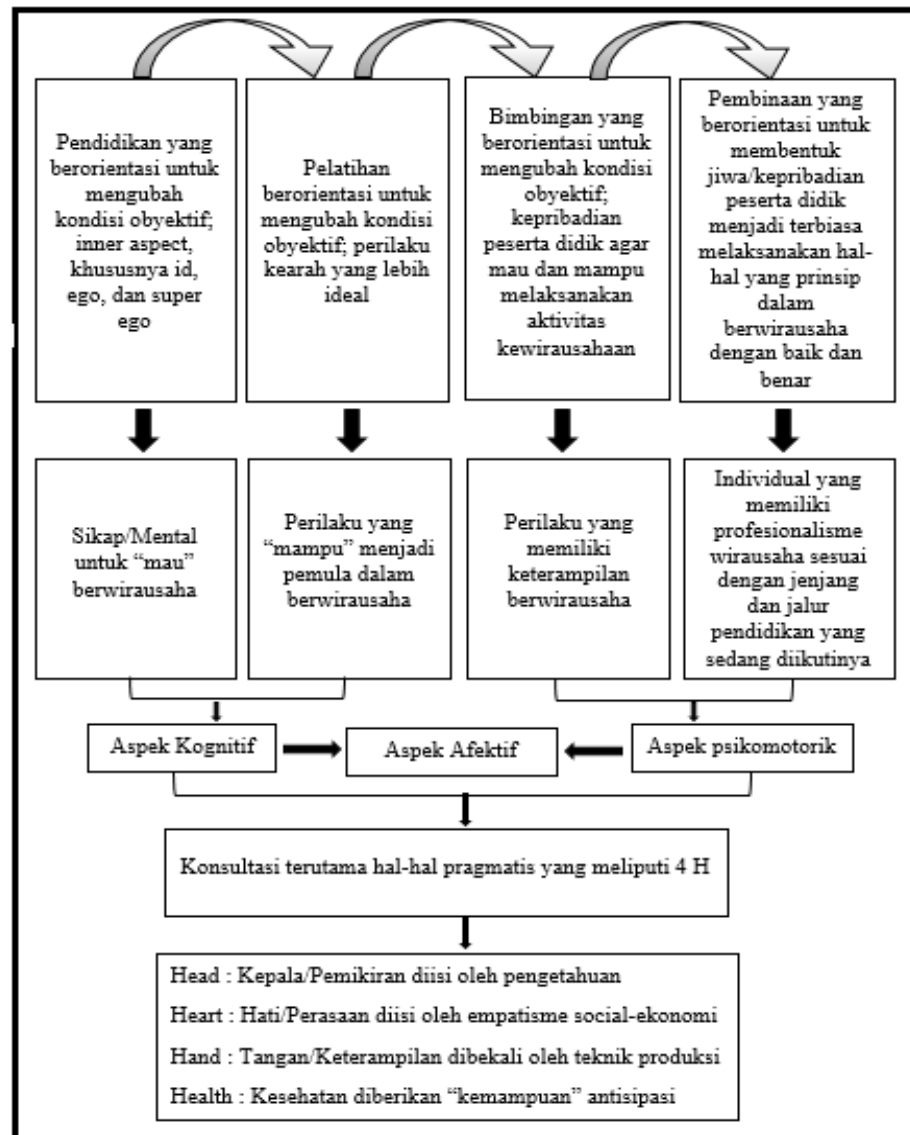
Bamawi Ciputra (2012) memperkenalkan siklus belajar entrepreneurship yang memiliki lima fase, yaitu fase exploring, planning, producing, fase communicating atau marketing, dan fase reflecting.

- a. *Fase exploring*, adalah fase mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, yaitu dengan melakukan penelitian atau pengamatan terhadap peluang pasar.
- b. *Planning*, yaitu fase membuat perencanaan dengan mencurahkan ide dan gagasan peserta didik. Peserta didik praktik langsung membuat rencana dan menciptakan sistem kerja dengan memerhatikan hasil exploring.
- c. *Producing*, yaitu fase menimbulkan manfaat atau faedah baru. Pada tahap ini, peserta didik berinovasi dengan membuat penemuan baru, pengembangan, atau sintesis, juga berlatih untuk mengelola konsekuensi buruk (risiko) yang akan dihadapi.
- d. *Fase communicating atau marketing*, yaitu fase melakukan sosialisasi untuk menarik minat pelanggan atas produk/jasa yang telah dibuat. Caranya dengan melakukan promosi ke masyarakat.
- e. *Fase reflecting*, yaitu fase untuk mencari sisi kelebihan dan kerugian atas proses yang telah dilewati dan mengambil kesimpulan, dengan mengevaluasi dari awal kegiatan sampai hasil yang diperoleh.

Menurut (Eman Suherman, 2013) pola pembelajaran kewirausahaan minimal mengandung empat unsur sebagai berikut :

- a. Pemikiran yang diisi oleh pengetahuan tentang nilai-nilai, semangat, jiwa, sikap dan perilaku, agar peserta didik memiliki pemikiran kewirausahaan.
- b. Perasaan, yang diisi oleh penanaman empatisme sosialekonomi, agar peserta didik dapat merasakan suka-duka berwirausaha dan memperoleh pengalaman empiris dari para wirausaha terdahulu.
- c. Keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk berwirausaha.
- d. Kesehatan fisik, mental dan sosial. Sehubungan dengan hal ini, peserta didik hendaknya dibekali oleh teknik-teknik antisipasi terhadap berbagai hal yang mungkin timbul dalam berwirausaha baik berupa persoalan, masalah maupun risiko lainnya sebagai wirausaha.

Seperti yang tertuang pada gambar dibawah, pola dasar pembelajaran kewirausahaan sebagai berikut:



**Gambar 3. Pola Dasar Pembelajaran Kewirausahaan**

*Sumber: Eman Suherman (2013)*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau prosedur untuk menganalisis suatu permasalahan atau fakta lapangan berdasarkan tinjauan pustaka atau teori. Pemilihan jenis metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian adalah syarat dari penelitian itu sendiri. Pemilihan metode penelitian yang tepat dapat menentukan kelancaran bagi seorang peneliti. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Jenis penelitian deskriptif diambil karena hasil penelitian ini akan mendeskripsikan tentang analisis Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha. Sedangkan pendekatan kualitatif diambil karena peneliti lebih banyak interaksi komunikatif dalam mendapatkan data nantinya. (Singarimbun, 1995) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. (Narbuko dan Achmadi, 1997) mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi penelitian deskriptif juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Maka penelitian deskriptif kualitatif menjadi jenis penelitian yang sangat berguna dalam mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sehingga dapat



mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut dan disajikan dalam bentuk tulisan.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian digunakan untuk memberikan batasan terhadap masalah yang akan dibahas atau dikaji sehingga objek yang akan diteliti layak dan tidak meluas serta dapat menemukan solusi atau jawaban terbaik untuk mengatasi masalah yang ada dan proses pengembangan selanjutnya. Hal tersebut senada dengan konsep yang dipaparkan oleh (Moleong, 2007), bahwa ada dua tujuan dalam penentuan fokus penelitian; yaitu: *pertama*, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat dan objek akan menjadi layak untuk diteliti. *Kedua*, penetapan fokus secara efektif menetapkan kriteria untuk menyaring informasi yang masuk. Melalui penetapan fokus penelitian, dapat membatasi studi agar menjadi lebih terarah dan tidak melebar kepada masalah yang lebih luas sehingga informasi yang diperoleh saat melakukan penelitian menjadi relevan dengan permasalahan.

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan di Kabupaten Pohuwato :

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
  - a. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen
  - b. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

c. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM

2. Pelatihan Teknologi Pengemasan bagi Pelaku UKM

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian memiliki kontribusi besar dalam proses pengambilan data mengenai objek penelitian secara optimal. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk rumusan masalah penelitian. Untuk mengetahui keadaan secara praktis dan memperoleh data yang valid mengenai Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha di Kabupaten Pohuwato. Dari lokasi penelitian ini peneliti akan mendapatkan fenomena dari objek yang diteliti. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Alasan Peneliti memilih lokasi ini karena Kabupaten Pohuwato memiliki Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang ikut berperan dan diharapkan dalam program mencetak wirausawan di Kabupaten Pohuwato.

Adapun situs penelitian yang merupakan tempat dimana peneliti memperoleh data atau informasi yang diperlukan untuk rumusan permasalahan yang dikemukakan. Situs penelitian adalah letak atau tempat dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah dan fokus penelitian yang telah diterapkan. Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Alasan peneliti memilih situs ini karena situs tersebut terlibat langsung atau berperan langsung terhadap program

mencetak wirausahaan. Sehingga peneliti dapat mendapatkan data-data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian dari situs tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu manusia sebagai nara sumber, peristiwa-peristiwa, dokumen-dokumen dan data-data. Sumber data haruslah mendukung penelitian dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Lofland dalam (Moleong, 2006) mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Hal ini karena dalam Penelitian kualitatif cenderung mengutamakan pengamatan langsung untuk memperoleh data dan wawancara yang dapat memberikan informasi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Jenis penelitian ini dikelompokkan dalam dua jenis data berdasarkan cara memperolehnya yaitu data primer dan sekunder. (Sugiyono, 2014) mengatakan bahwa data primer adalah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari informan, misalnya melalui orang lain. Tetapi data sekunder tetap harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karena sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung atau dari lapangan saat melakukan penelitian berupa wawancara dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung untuk mendukung data primer yang bisa didapat secara tidak langsung. Data sekunder dapat diperoleh dari media cetak atau elektronik, regulasi-regulasi, artikel-artikel dari internet, jurnal, buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian mengenai Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha. Data Sekunder yang diperoleh antara lain adalah LAKIP kinerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2017, RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2016 – 2021.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian terdapat teknik pengumpulan data atau cara-cara yang digunakan dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Diperlukan cara-cara yang tepat untuk mendapatkan data yang akurat dalam menjawab

permasalahan yang ada. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2014) melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung kepada dinas terkait di Kabupaten Pohuwato yaitu pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan topik penelitian tersebut. Observasi yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara lain adalah melakukan observasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan dimana dua orang atau lebih saling bertatap muka untuk saling bertanya, menjawab dan mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. Narbuko dan Achmadi (1997) mengatakan bahwa tujuan wawancara adalah hanya untuk mendapatkan informasi bukan untuk mengubah pendapat atau mendoktrin responden. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan dalam jenis penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM khususnya staff Sub Bagian Keuangan dan Program serta Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan

UKM mengenai Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung dengan:

- a. Bapak Yusuf Poluli, SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- b. Ibu Drs. Fatma Radjulani sebagai Sekertaris Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- c. Ibu Samsiidar, SE sebagai Sub Bagian Keuangan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- d. Ibu Hj. Normawati Tangahu, Am.Pd sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- e. Ibu Masrah Modnin, SE sebagai Kasi Pengembangan Usaha Koperasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- f. Ibu Yalina Akib, SE Kasi Bimbingan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.
- g. Pak Hasan sebagai perwakilan dari masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato.

### 3. Dokumentasi

Sugiyono (2014) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip-arsip atau dokumen-dokumen, sehingga akan diperoleh data yang lengkap. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam hal ini

peneliti mencari data-data dari dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato antara lain adalah foto-foto saat melakukan observasi dokumen berupa LAKIP kinerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2017, RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2016 – 2021.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Wisadirna (2005) mengatakan bahwa instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipergunakan untuk mengumpulkan data atau informasi. Dalam suatu penelitian, alat pengambil data atau instrumen menentukan kualitas data yang dapat dikumpulkan dan kualitas itu menentukan kualitas penelitiannya, oleh karena itu dalam suatu penelitian, instrumen yang digunakan atau dibuat harus cermat. Jenis instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Peneliti Sendiri**

Moleong (2006) mengatakan bahwa peneliti sendiri dapat menggunakan panca indra dalam melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di tempat penelitian. Sedangkan (Arikunto, 2009) mengatakan bahwa peneliti sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian. Maka dalam penelitian ini peneliti adalah sumber utama dalam melakukan penelitian mengenai Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha.

## 2. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang agar tidak melenceng dari topik penelitian dan mendapat informasi yang akurat dan tepat. (Arikunto, 2009) mengatakan bahwa pedoman wawancara merupakan rangkaian daftar pertanyaan untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dimaksud adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang sesuai dengan focus penelitian. Dengan wawancara yang mendalam, peneliti akan memperoleh informasi yang berkaitan dengan Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha di Kabupaten Pohuwato. Semua materi dari pedoman wawancara dapat dilihat pada halaman lampiran.

## 3. Catatan Lapangan

Catatan lapangan adalah catatan yang dibuat untuk mencatat hasil pengamatan di lapangan dan hasil wawancara oleh peneliti. (Arikunto, 2009) mengatakan bahwa catatan lapangan merupakan catatan peneliti yang diperoleh dengan cara mencatat, file atau data yang didapat selama melakukan penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini catatan lapangan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha di Kabupaten Pohuwato. Catatan lapangan memiliki fungsi untuk mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang



berisi tentang data atau informasi yang didapat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

#### 4. Peralatan pendukung

Arikunto (2009) Mengatakan bahwa peralatan pendukung adalah alat-alat yang digunakan untuk membantu mengumpulkan data peneliti. Peralatan pendukung dapat berupa alat tulis untuk mencatat, atau kamera untuk mengambil gambar dilapangan. Dalam penelitian ini alat tulis digunakan untuk mencatat informasi-informasi yang didapat dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, kamera digunakan untuk mengambil gambar ketika melakukan observasi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah tahap yang sangat penting di dalam penelitian, karena pada tahap inilah kesimpulan-kesimpulan dan hasil dari penelitian dapat diperoleh peneliti. (Wisadirana, 2005) mengatakan bahwa analisis data adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif karena peneliti akan dapat mendeskripsikan hal-hal apa saja yang akan diteliti sesuai dengan fokus dan teknik pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini.

Data kualitatif adalah data yang muncul berwujud pernyataan-pernyataan bukan berbentuk angka dengan rumus atau perhitungan tertentu. Data itu bisa didapat

dengan beberapa cara, antara lain yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diproses hingga siap untuk disusun dan dipaparkan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti selama penelitian adalah model analisis milik (Miles, Huberman dan Saldana , 2014), analisis data itu terdiri dari:

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan, data dapat berupa data wawancara, dokumentasi, dan dokumen. Pada tahap wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato antara lain kepada Bapak Yusuf Poluli, Ibu Fatma Radjulani, Ibu Samsiidar, Ibu Normawati Tangahu, Ibu Masrah Modnin, Ibu Yalina, serta pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato yakni Pak Hasan. Kemudian dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengambilan gambar-gambar yang dibutuhkan ketika sedang melakukan observasi pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Sedangkan data dokumen dapat diperoleh dari dokumen resmi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato LAKIP kinerja tahunan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2017, RENSTRA Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato 2016-2021.

#### 2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Kondensasi data merupakan satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan. Kondensasi data bertujuan untuk lebih memfokuskan data-data yang telah didapatkan melalui proses pengumpulan data. Data wawancara

kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato antara lain kepada Bapak Yusuf Poluli, Ibu Fatma Radjulani, Ibu Samsiidar, Ibu Normawati Tangahu, Ibu Masrah Modnin, Ibu Yalina, serta pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato yakni Pak Hasan. dirangkum dengan tujuan mempermudah dalam membuat laporan penelitian tanpa menghilangkan data.

### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

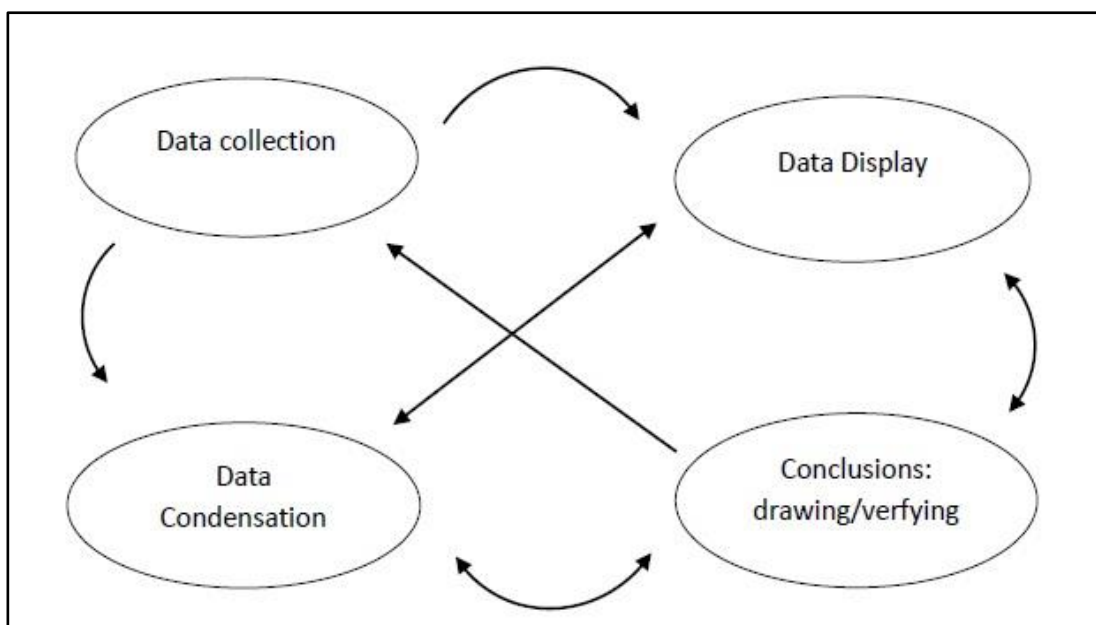
Dengan melakukan penyajian data, peneliti dapat memahami peristiwa yang terjadi dan tindakan tepat yang perlu dilakukan. Peneliti menyajikan data dengan cara mendiskripsikannya. Data disajikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan agar penelitian dapat fokus dan tidak melebar. Dalam penyajian data terdapat gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Pohuwato, yang terdiri dari sejarah Kabupaten Pohuwato, keadaan geografis Kabupaten Pohuwato, visi misi Kabupaten Pohuwato, gambaran umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, visi misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, tupoksi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato dan struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato serta penyajian data sesuai focus penelitian berupa penyajian hasil wawancara dan hasil foto saat melakukan observasi dan hasil yang diperoleh melalui dokumen.

### 4. *Conclusions: Drawing/Verfyng* (Penarikan Kesimpulan dan Verivikasi)

Penarikan kesimpulan atau verivikasi merupakan dari pengumpulan data, menganalisis mulai dari penejelasan wawancara dan bukti data dokumen serta bukti

observasi peneliti dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkap sejak awal. Melalui proses verifikasi ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis pembahasan yang berkaitan dengan Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha di Kabupaten Pohuwato.

Berikut ini adalah gambaran dari proses analisis data interaktif milik Miles, Huberman dan Saldana 2014:



**Gambar 4. Proses analisis data interaktif Miles, Huberman dan Saldana 2014**

*Sumber : Mile, Huberman dan Saldana (2014)*

Melalui gambar diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat 4 alur kegiatan atau tahapan yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusions : drawing / verifying* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

Ke empat tahapan analisis data tersebut, pada dasarnya sebagai sesuatu yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Sehingga dalam penelitian kualitatif, analisis data pada akhirnya akan lebih banyak didominasi oleh kata, kalimat dan ungkapan serta sedikit menggunakan data berupa angka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian merupakan salah satu kontribusi besar dalam proses pengambilan data mengenai objek penelitian secara optimal. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk rumusan masalah penelitian. Untuk mengetahui keadaan secara praktis dan memperoleh data yang valid mengenai Rencana Strategi Program Mencetak Wirausahawan di Kabupaten Pohuwato, maka lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah Kabupaten Pohuwato.

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Pohuwato**

###### **a. Sejarah Kabupaten Pohuwato**

Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah paling barat Provinsi Gorontalo. Daerah ini juga dikenal oleh masyarakat sebagai Bumi Panua karena merupakan daerah yang memiliki satwa yang saat ini sudah langka “Burung Panua”. Asal mula nama Pohuwato, berasal dari kata Pohuwatalo atau Pilohuwata (Ali Mobiliu, Momu’ato 1, 2013), yakni berawal dari 2 (dua) kata yang memiliki kesamaan istilah, namun memiliki arti yang berbeda, yakni, pertama “Pohuwatalo, Pilohuwata” yang artinya tempat ditempuhnya perjalanan jauh yang berawal dari perjalanan Mbui

Owutango dan rombongan ke Kerajaan Palasa di Moutong dan kedua, “Pilohuwata” yang artinya tempat tertabraknya perahu yang ditumpangi oleh 4 Raja, yakni Raja Bunuyo, Sipayo, Soginti dan Siduan (juga pengawal Mbui Owutango) di Huta bumbu-bumbungo”, yakni tanah/daratan yang agak tinggi (Bumbulan sekarang) saat menuju ke Kerajaan Palasa di Moutong. Pada zaman Belanda, istilah Pohuwatalo” ditulis dalam Ejaan Van Ophuijsen menjadi “Paguata” sehingga lama kelamaan ditulis menjadi Paguat.

Sebelum menjadi sebuah Kabupaten, daerah ini menjadi bagian dari Kabupaten Boalemo. Namun karena keinginan masyarakat yang sangat kuat untuk menjadi sebuah daerah otonom baru, Pemerintah Pusat akhirnya mengakomodir keinginan dan perjuangan rakyat Pohuwato tersebut dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditanda tangani oleh Presiden ketika itu Megawati Soekarno Putri.

Berdasarkan hal itu, maka pada tanggal 6 Mei 2003, Kabupaten Pohuwato secara resmi memiliki pemerintahan baru dengan ditandai pelantikan Drs. Yahya K. Nasib sebagai Penjabat Bupati Pohuwato oleh Gubernur Gorontalo ketika itu, Dr. Ir. Fadel Muhammad, M.Si. Hari pelantikan Penjabat Bupati itulah, selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Kabupaten Pohuwato yang diperingati setiap tahun.

Mendiang Yahya K. Nasib memimpin Kabupaten Pohuwato selama masa transisi 2 tahun. Setelah itu, Pemilihan Kepala Daerah untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 2005 dan terpilih sebagai Bupati pertama H.

Zainuddin Hasan dan Wakil Bupati Ir. H. Yusuf Giasi yang menjabat hingga tahun 2010.

Pada tahun 2010, Pemilihan Kepala Daerah digelar untuk kedua kalinya dan melahirkan pemimpin baru H. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, MM dan Drs. H. Amin Haras sebagai Wakil Bupati periode 2010-2015. Keduanya dilantik oleh Gubernur Gorontalo ketika itu Dr. Ir. Gusnar Ismail, MM.

Sosok Syarif Mbuinga sebelumnya pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan setelah Kabupaten Pohuwato menjadi daerah otonom baru, Beliau didaulat menjadi Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato hingga tahun 2010. Sementara Wakil Bupati Drs. H. Amin Haras adalah birokrat senior yang sudah kaya akan pengalamannya sebagai aparatur ketika masih bagian dari Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo hingga menjadi daerah otonom Kabupaten Pohuwato.

Berkat kinerja pemerintahan keduanya yang mampu memenuhi harapan masyarakat, maka kedua pemimpin ini didaulat kembali oleh Rakyat Kabupaten Pohuwato untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 melalui hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan 15 Desember 2015. Keduanya dilantik oleh Gubernur Drs. H. Rusli Habibie, M.Ap pada 17 Februari 2016.

#### **b. Keadaan Georafis**

Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung Barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 00 .22'0" – 0 0 .57'0"



Lintang Utara dan 1210 .23'0" – 1220 .19'0" Bujur Timur, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26,00 C – 27,60 C. Dengan luas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah 4.244,31 km<sup>2</sup> atau 36,77 % dari total luas Provinsi Gorontalo. Secara geografis batas-batas wilayah Kabupaten Pohuwato adalah:

- 1) Sebelah utara : Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah)
- 2) Sebelah timur : Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo).
- 3) Sebelah selatan : Teluk Tomini.
- 4) Sebelah barat : Kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah)

Letak yang strategis Kabupaten Pohuwato yaitu berada di wilayah tengah dari Kawasan Teluk Tomini, berhadapan langsung dengan daerah wisata International yaitu Pulau Togian di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan waktu tempuh dari Kota Marisa sekitar 2 Jam melalui jalur laut (speedboat). Adanya pelabuhan laut dan pelabuhan ferry akan menjadikan Kabupaten Pohuwato menjadi daerah pemicu perkembangan daerah-daerah di kawasan Teluk Tomini. Selain itu, letak Kabupaten Pohuwato yang berada di jalan poros Trans Sulawesi yang dilintasi oleh jalur transportasi darat dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, sangat menunjang percepatan perkembangan ekonomi daerah.

### **c. Visi dan Misi Kabupaten Pohuwato**

#### **1) Visi**

Kabupaten Pohuwato memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pohuwato MADANI (Maju-Asri-Demokratis-Agamis-Harmonis)”. Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- a) Pohuwato Maju adalah suatu cita-cita besar kami bagaimana memajukan pohuwato dari aspek ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur serta pengelolaan pemerintahan daerah melalui pendekatan penyempurnaan reformasi birokrasi.
- b) Pohuwato Asri adalah suatu cita-cita kami mewujudkan kawasan perkotaan yang hijau dan nyaman serta mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- c) Pohuwato Demokratis adalah suatu cita-cita kami memelihara, mempertahankan bahkan meningkatkan kehidupan demokrasi yang produktif dan berkualitas sehingga berdampak pada percepatan kesejahteraan masyarakat.
- d) Pohuwato Agamis adalah suatu cita-cita kami mewujudkan pohuwato yang religius, marak dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tetap mengedepankan toleransi tinggi terhadap pengamalan agama masing-masing.
- e) Pohuwato Harmonis adalah suatu cita-cita kami mewujudkan kebersamaan semua pihak dalam mengatasi berbagai permasalahan dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat.

## **2) Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi menuju pembangunan Kabupaten Pohuwato 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing
- b) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- d) Mewujudkan pemerintahan yang baik

Untuk mencapai visi dan misi tersebut diatas, kabupaten Pouhuwato menetapkan 4 tujuan pembangunan yakni :

- a) Mewujudkan daerah yang maju dan berdaya
- b) Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
- c) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
- d) Mewujudkan pemerintahan yang baik, masyarakat harmonis dan agamis

## **2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato**

### **a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Perdagangan koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato**

#### **1) Visi**

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan sektor industri perdagangan Koperasi dan UKM, yang akan dihadapi Kabupaten Pohuwato 2016-2021, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk

mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan Kabupaten Pohuwato 2016-2021 berangkat dari landasan visi:

“Terwujudnya Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM yang Tangguh, Mandiri, Berdaya Saing Global Dilandasi Nilai Spritual serta berbasis Ekonomi Kerakyatan “.

## **2) Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi dalam rangka pembangunan ekonomi kerakyatan Kabupaten Pohuwato 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong pertumbuhan sektor koperasi, Industri dan Perdagangan;
- b) Meningkatkan Sumber daya manusia (SDM) disektor koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yg handal, profesional dan religius;
- c) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar distribusi , promosi, pengguna produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan dan perlindungan konsumen;
- d) Mewujudkan kelembagaan Koperasi, perindustrian, perdagangan yang kuat di era globalisasi;
- e) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan disektor koperasi, perindustrian, perdagangan;

## **b. Tugas, Pokok dan Fungsi**

### **1) Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah dalam merencanakan dan melakukan pengawasan program dan kegiatan pembangunan dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Merencanakan sasaran dan kebijakan pembangunan Koperasi dan UKM;
- b) Penyusunan Program dan Perindustrian dan Perdagangan yang mengacu pada sasaran dan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato;Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato;
- c) Pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato;
- d) Pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato;

- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi, dan UKM, ;
- f) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik tingkat Pusat maupun tingkat Daerah.
- g) Menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala dan tepat waktu menyangkut pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2) Sekretaris Dinas**

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi dibidang perencanaan, kepegawaian dan keuangan serta kepada semua bidang dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Menyiapkan dan menyusun rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM ;
- b) Menyiapkan dan mengawasi urusan administrasi kepegawaian;
- c) Menyiapkan dan mengawasi aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- e) Pengelolaan administrasi keuangan;
- f) Pelaksanaan teknis administrasi keuangan;

- g) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, kepegawaian dan keuangan;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan sub dinas-sub dinas, kelompok fungsional dan unit pelaksanan teknis dinas.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sebagai atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sekretaris yang juga membawahi sekretariat dinas, terdiri dari Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Masing-masing Sub bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a) Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, menganalisa rencana kegiatan dan pengelolaan keuangan Dinas yang telah dibuat oleh masing-masing bidang dilingkungan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

1. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan/data penyusunan renstra, Renja dan program kegiatan tahunan;
2. Menyusun dan menyiapkan penjabaran renstra, renja dan program kegiatan tahunan;

3. Menyusun rencana kebutuhan barang dan jasa serta sarana prasarana penunjang kelancaran operasional kantor;
  4. Menyusun SOP standar pelayanan minimal dan standar pelayanan publik;
  5. Menyusun LAKIP
  6. Menyusun RKA dan DPA Dinas
  7. Meneliti dan memeriksa pelaksanaan anggaran atas dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN
  8. Meneliti dan memeriksa realisasi rincian dan ringkasan belanja langsung dan tidak langsung;
  9. Pemeriksaan dan penelitian surat penyesuaian dana (SPD) Kelengkapan kelengkapan bukti pembayaran perhitungan dan pembenahannya;
  10. Meneliti dan memeriksa Surat Perintah Membayar (SPM)
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas inventarisasi, penataan dan pemeliharaan aset, serta mengelola administrasi kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengarsipan dan keprotokoleran;



2. Melaksanakan penataan dan pengelolaan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
3. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan, dan penata-usahaan aset Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik negara/daerah
4. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
5. Menyiapkan bahan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan kantor.
6. Menyiapkan administrasi penggunaan dan pemakaian peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Membuat laporan kepegawaian secara periodik

### **3) Bidang Perindustrian**

Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;
- b) Merumuskan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengawasan usaha industri.

- c) Merumuskan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengelolaan dan pengembangan kawasan industri dan penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor lainnya;
- d) Mengawasi pelaksanaan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) barang dan jasa industri;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian persaingan usaha serta legalisasi produk;
- f) Melakukan pengawasan proteksi terhadap produk lokal industri;
- g) Mengawasi pengelolaan sumber penerimaan pendapatan asli daerah bidang industri;
- h) Memberikan perlindungan kepastian terhadap usaha industri;
- i) Menyusun rencana jangka panjang pembangunan industri;
- j) Menetapkan bidang usaha industri prioritas;
- k) Melaksanakan upaya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang kota industri serta mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana industri;
- l) Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan asosiasi industri;
- m) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan usaha industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan;
- n) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan.

- o) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sebagai atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p) Melaksanakan tugas pokok pembinaan perindustrian.

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai terdiri dari Seksi Industri Kecil Menengah, Seksi Industri Agro, dan Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

- a) Seksi Industri Kecil Dan Menengah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Industri Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
2. Menyusun laporan hasil kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan bidang;
3. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan ikm dalam rangka menciptakan usaha ikm yang tangguh dan mandiri;

4. Memfasilitasi pelaksanaan promosi, pemasaran dan kerjasama usaha;
  5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan perlindungan ikm;
  6. Melaksanakan pengolahan dan informasi data ikm;
  7. Menyusun program pengembangan sentra – sentra ikm;
  8. Menciptakan iklim usaha dan persaingan yang kondusif dengan regulasi yang berpihak pada ikm;
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Industri Agro sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri, pemanfaatan fasilitas, penggunaan bahan baku, teknologi industri dan tenaga kerja. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Industri Agro mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
  2. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  3. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan industri agro;

4. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang industri agro;
5. menjalin kemitraan usaha dan permodalan dibidang industri agro;
6. melaksanakan pengaturan, pengembangan dan penyelenggaraan peningkatan daya saing usaha industri, fasilitas akses permodalan;
7. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok usaha industri tertentu;
8. melakukan pengawasan dan pembinaan atas kegiatan usaha industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan;
9. melaksanakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual usaha industri agro;
10. memberikan perlindungan terhadap usaha produk lokal tertentu usaha industri agro;
11. mengkoordinasikan kegiatan promosi terhadap hasil usaha industri agro;
12. melakukan kegiatan pendataan dan pengolahan data bidang industri agro;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha industri agro;

14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c) Seksi Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan aneka (ILMEA); Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi Industri Logam Mesin, Elektronika dan Aneka mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan rencana kegiatan seksi sebagai bahan penyusunan program bidang;
2. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan aneka sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembinaan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
5. Menjalin kemitraan usaha dengan industri kecil, menengah dan industri besar;
6. Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;

7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan;
8. Melaksanakan pembinaan terhadap kelembagaan/asosiasi industri logam, mesin, elektronika, dan aneka;
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Perdagangan**

Kepala Bidang Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan dalam Negeri maupun luar Negeri. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Membuat program bidang perdagangan berdasarkan rencana kerja masing-masing seksi;
- b) Menyelenggarakan pembinaan/pengembangan usaha dan sarana penunjang perdagangan dalam negeri serta peningkatan produksi dalam negeri;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha;

- d) Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi distribusi harga barang kebutuhan pokok, strategis dan jasa;
- e) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi potensi sektor perdagangan;
- f) Memfasilitasi pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK);
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan melaksanakan tugas pokok pembinaan perdagangan. Bidang Perdagangan terdiri dari Seksi Perdagangan Dalam Negeri, Seksi Pasar dan Pengembangan Usaha, Seksi Perlindungan Konsumen. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang..

- a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pokok merencanakan melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian program perdagangan dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :



1. Menyiapkan bahan untuk penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga dalam negeri;
  2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi , distribusi, harga barang kebutuhan pokok, strategis dan jasa;
  3. Menyiapkan bahan pengkajian untuk pengusulan pembentukan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) kepada pemerintah,koordinasi dengan provinsi dan fasilitas operasional bpsk;
  4. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (uttp) barang dalam kemasan dan satuan internasional;
  5. Menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dan koordinasi perdagangan dalam negeri;
  6. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala;
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b) Seksi Pasar dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan perumusan kebijakan,program dan kegiatan pengelolaan pasar dalam pemungutan retribusi pasar dan pengelolaan pengembangan usaha.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pasar dan Pengembangan Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja seksi pasar dan pengembangan usaha;
  2. Melaksanakan pembinaan, penataan dan penempatan pedagang dalam pasar dan menyelenggarakan fasilitas pengembangan usaha;
  3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis serta pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
  4. Melaksanakan pengawasan pengendalian dan pemungut retribusi pasar atas penggunaan pasar;
  5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi , distribusi, harga barang kebutuhan pokok, strategis dan jasa;
  6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi produk daerah;
  7. Menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dan koordinasi perdagangan dalam negeri;
  8. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan standarisasi dan perlindungan konsumen. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana

dimaksud Seksi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis baik standarisasi maupun Perlindungan Konsumen;
2. Memfasilitasi pelaku dunia usaha untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan produksi barang dan jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
3. Melakukan pengawasan standarisasi dan di bidang perdagangan serta mediasi permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha;
4. Melakukan mediasi dan pembinaan terhadap pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen;
5. Melakukan pengawasan, monitoring terhadap standarisasi barang kebutuhan pokok, barang penting dan strategis lainnya;
6. Menyiapkan bahan dalam rangka konsultasi dan koordinasi perlindungan konsumen;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **5) Bidang Koperasi dan UKM**

Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyusun kebijakan teknis, melaksanakan penyuluhan, bimbingan pengembangan, supervisi

dan pengawasan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kelembagaan, usaha Koperasi dan UKM;
- b) Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian;
- c) Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan standarisasi organisasi, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi;
- d) Pelaksanaan penyuluhan, pengembangan organisasi, dan tatalaksana Koperasi dan UKM;
- e) Melakukan evaluasi pemeringkatan koperasi;
- f) Pelaksanaan bantuan advokasi penyelesaian dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi Koperasi dan UKM;
- g) Penyusunan rencana dan kebijaksanaan teknis pengembangan usaha Koperasi dan UKM;
- h) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha Koperasi dan UKM sektor pertanian maupun sektor non pertanian;
- i) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha Koperasi dan UKM
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi dan UKM melaksanakan tugas pokok pembinaan kelembagaan dan sumber daya koperasi dan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari Seksi Kelembagaan Koperasi, Seksi Usaha Koperasi dan Seksi Pemberdayaan UKM. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

a) Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas melakukan kelembagaan dan Pengawasan koperasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana dan kebijaksanaan teknis pembinaan kelembagaan, tatalaksana dan pemeringkatan koperasi;
2. Menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang-undangan dibidang koperasi;
3. Menyiapkan data dan melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan/organisasi dan manajemen koperasi;

4. Melakukan pembinaan dan pemantapan tatalaksana koperasi (rapat anggota, administrasi organisasi, pembukuan/akuntansi, audit laporan keuangan);
5. Melakukan pembinaan dan bantuan advokasi penyelesaian permasalahan kelembagaan yang dihadapi koperasi;
6. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi;
7. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Seksi Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan usaha Koperasi sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Usaha Koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan kebijaksanaan teknis pengembangan usaha koperasi;
2. melakukan pembinaan pemantapan, dan pengembangan usaha dan permodalan koperasi;
3. melakukan suvervisi dan pengawasan terhadap pengelolaan usaha koperasi;

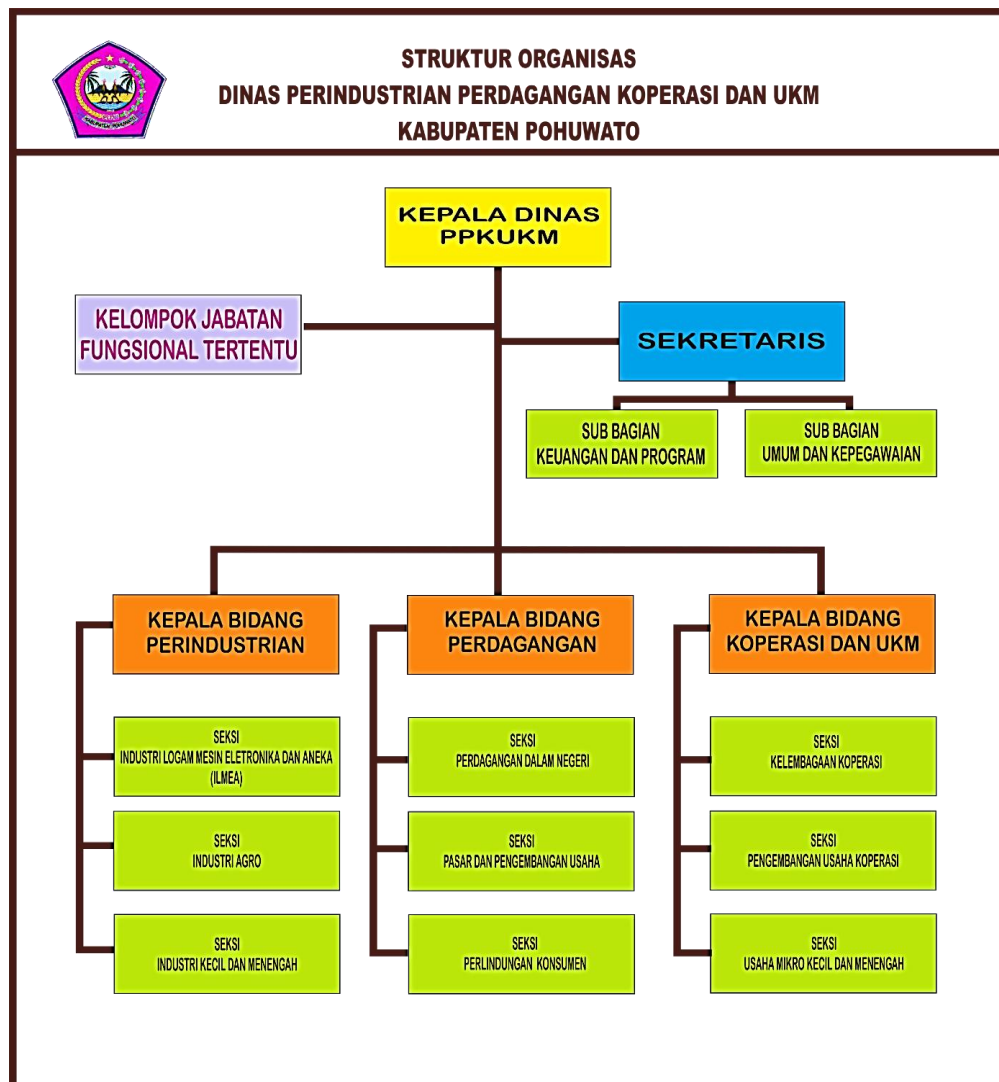
4. melakukan pembinaan dan advokasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan usaha koperasi;
5. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

c) Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan Usaha Kecil Menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemberdayaan UKM mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan kebijaksanaan teknis Usaha Kecil dan Menengah
2. Melakukan pembinaan, pemantapan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
3. Melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah
4. Melakukan pembinaan dan advokasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya

### c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato dapat dilihat pada gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato sebagai berikut:



**Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Dan UKM, Kabupaten Pohuwato**



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah**

#### **a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen**

Dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) tidak semata mata muncul dengan sendirinya, perlu adanya pendampingan dari pemerintah untuk munculnya UKM baru di kabupaten Pohuwato. Pemerintah yang dikaksudkan adalah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, pemerintah dibutuhkan dalam melakukan pendampingan untuk membantu masyarakat memulai dalam membangun UKM, dalam hal ini masyarakat harus memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah mereka, sehingga masyarakat dapat mengambil manfaat yang dimiliki daerah mereka terutama di kabupaten Pohuwato. Perlu adanya pendampingan dari pemerintah dalam pengembangan UKM bagi masyarakat sehingga dalam mengembangkan Usaha mereka selain mempunyai *role model* dalam mengembangkan usaha mereka, juga memiliki peraturan dalam pengembangan UKM di kabupaten Pohuwato, seperti dalam pemecahan masalah-masalah yang muncul dalam membangun usahanya.

Dalam proses pengembangan UKM para pelaku usaha kerap kesulitan dalam menciptakan atau membuka akses untuk pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh UKM, seperti pasar ataupun promosi. Selain itu para

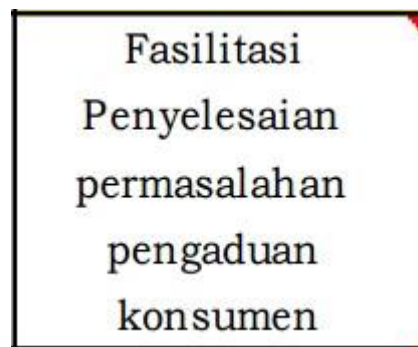
pelaku UKM kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan beberapa pihak. Juga dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh UKM yang sedang berkembang maupun yang sudah besar. Sehingga Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM perlu melakukan pendampingan dalam hal-hal tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Poluli, SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

“Pada umumnya para pelaku usaha kecil kesulitan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain maupun menciptakan atau membuka akses untuk kebutuhannya sendiri. Oleh karna itu mereka masih memerlukan pendampingan-pendampingan dari kamu untuk dapat melakukan hal-hal tersebut. Kami melakukan program pendampingan dalam hal menjalin kerja sama dengan pihak lain, kami melakukan pendampingan untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh UKM, serta kami melakukan pendampingan dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi para UKM.” (wawancara tanggal 10 April 2017, pukul 09.00 WITA diruangan Kepala Dinas Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato).

Dapat dikatakan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato merupakan suatu peran yang penting dilakukan mengingat dalam proses pembangunan usaha memerlukan *role model* atau panutan usaha yang sudah berkembang besar agar dapat dicontoh, tidak hanya itu peran dinas dalam pendampingan juga sangat berpengaruh, mengingat adanya berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh pengusaha dalam

membangun usahanya, selain dalam hal kerjasama juga dalam pemenuhan kebutuhan para pelaku usaha untuk memajukan usahanya.

Fasilitas yang diberikan dalam pengembangan UKM disebutkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021 adalah fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen, dalam mengembangkan UKM tidak bisa langsung berhasil dengan sendirinya, diperlukan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pengusaha sehingga UKM yang dikembangkan menjadi besar. Proses yang dilakukan juga tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang juga ada hambatan yang membuat pengusaha kualahan. Akan tetapi dengan begitu pelajaran akan dipetik dan menjadi pelajaran bagi pengusaha untuk lebih berhati-hati lagi dalam menentukan langkah yang akan dijalani nantinya.



**Gambar 6. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021**

*Sumber : Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021*

Sejalan dengan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh UKM maka Dinas memberikan solusi dengan mengadakan klinik untuk pemecahan masalah tersebut, seperti yang dijelaskan oleh ibu Hj. Normawati Tangahu, Am.Pd sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

“Para pelaku UKM masi perlu mempelajari banyak hal. Oleh karna itu kami rasa mereka perlu pendampingan dari kami. Selain pendampingan secara masiv dari kami, kami juga menyediakan klinik UKM yang membutuhkan pendampingan secara individu. Hal tersebut bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para pelaku UKM.” (wawancara tanggal 12 April 2017, pukul 10.00 WITA diruangan Bidang Koperasi Dan UKM dinas Disperindagkop dan UKM Kabupaten Pohuwato).

Klinik yang dimaksud adalah konsultasi yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sedang mengalami permasalahan dalam usahanya untuk selanjutnya dibantu oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam pemecahan masalah tersebut. Seperti lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Hj. Normawati Tangahu, Am.Pd sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato.

“Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato sudah seperti wadah bagi para UKM. Mereka datang kemari bukan hanya ketika mereka sedang menghadapi masalah saja. Banyak juga para UKM setelah mengikuti pendampingan secara besar-besaran

yang akhirnya berminat mendatangi klinik UKM secara individu untuk mendapat penanganan lebih lanjut.” (wawancara tanggal 12 April 2017, pukul 10.00 WITA di ruangan Bidang Koperasi Dan UKM dinas Disperindagkop dan UKM kabupaten Pohuwato)

Dijelaskan bahwa para pelaku usaha mendatangi Dinas untuk menjalani pendampingan pemecahan masalah, akan tetapi ada juga pelaku UKM yang merasa pemecahan permasalahan tersebut tidak memerlukan pendampingan ataupun malu untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi. Dalam pendampingan pemecahan masalah UKM banyak pelaku UKM dengan permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dengan baik, hal ini memberikan dampak positif bagi pelaku UKM yang tidak menginginkan pendampingan menjadi ikut dalam pendampingan pemecahan masalah UKM yang sebelumnya sulit dalam memecahkan masalah sendiri menjadi mudah jika dibantu oleh Dinas dalam pendampingan pemecahan masalah. Seperti yang di paparkan oleh Pak Hasan sebagai perwakilan dari masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato.

“Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato sudah seperti keluarga. Proses pendampingan yang mereka lakukan sangat baik. Kami teman-teman UKM dapat berinteraksi secara langsung dengan mereka. Terutama klinik yang disediakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Kabupaten Pohuwato menurut saya hal tersebut sangat bermanfaat untuk membantu para pelaku UKM baru yang masih sangat memerlukan pendampingan. Tetapi hal itu kembali kepada para pelaku UKM masing-masing, ada juga beberapa pelaku UKM yang malas untuk

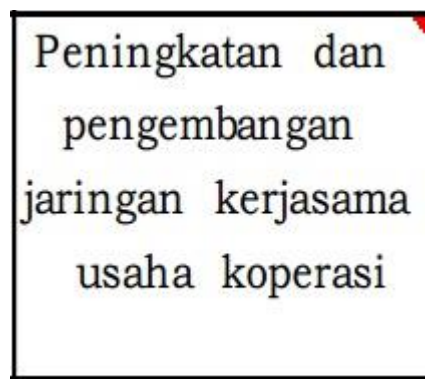
berkonsultasi dengan klinik secara rutin atau malu untuk meneritakan masalah-masalah usaha mereka.” (wawancara tanggal 27 April 2017, pukul 11.30 WITA ditempat pelaku usaha Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato)

Sambutan baik para pelaku UKM yang mempunyai permasalahan yang selanjutnya para pelaku UKM diundang oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk berkumpul di galeri yang bertempat di kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, para pelaku UKM secara bergantian menceritakan permasalahan dan saling berdiskusi bertukar pikiran satu sama lain serta perwakilan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM juga menyampaikan buah pikiranya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam pemecahan permasalahan bagi para pelaku UKM, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM memiliki dua metode, yaitu memecahkan masalah-masalah umum yang sering terjadi dengan skala besar, dan memecahkan masalah yang lebih spesifik (individu). Pemecahan permasalahan umum (skala besar) dilakukan dengan cara mengundang para pelaku UKM ke kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, untuk dilakukan seminar, sehingga pelaku UKM dapat bersimulasi dalam pemecahan permasalahan umum yang sedang dihadapi. Kemudian pemecahan masalah secara spesifik (individu) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengadakan klinik yang merupakan wadah bagi masyarakat pengusaha

sehingga dapat berkonsultasi secara gratis mengenai permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi secara lebih spesifik.

**b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi**

Sedangkan dalam menciptakan dan membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan pelaku UKM, pendampingan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM bekerja sama dengan dinas pada sektor lain maupun dinas UKM kabupaten/kota lain, seperti yang tertuang dalam Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021 disebutkan bahwa peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.



**Gambar 7. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021**

*Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021*

Melalui event yang diadakan, UKM di Kabupaten Pohuwato diberikan informasi dan mengikutsertakan mereka dalam event yang akan

diselenggarakan oleh daerah sendiri maupun daerah lain, akan tetapi dinas hanya sebatas membantu dalam membuka akses, bukan memberikan apa yang dibutuhkan oleh pelaku UKM. Dinas dalam membuka

“Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato membuka akses bagi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku UKM. Misalnya ketika mereka kesulitan dalam melakukan pengurusan PIRT, kami dapat membimbing mereka dalam pengurusan hal tersebut, apalagi pengurusan PIRT di Kabupaten Pohuwato gratis bagi seluruh UKM. Sedangkan dalam akses permodalan, kami tidak memiliki anggaran khusus untuk memberi bantuan permodalan kepada UKM secara langsung. Tetapi kami membantu dalam menciptakan akses untuk para UKM agar dapat mengakses permodalan terhadap sumber sumber dana. Kami hanya berperan sebagai perantara dalam hal ini, jadi tanggung jawab sepenuhnya milik UKM.” (wawancara tanggal 17 April 2017, pukul 10.00 WITA diruangan Sekretaris Dinas Disperindagkop dan UKM kabupaten Pohuwato)

Seiring yang disampaikan Ibu Drs. Fatma Radjulani sebagai Sekertaris Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyediakan berbagai kemudahan, seperti pengurusan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dinas hanya membimbing dalam pengurusan. Sedangkan untuk permodalan yang merupakan hal umum bagi pelaku UKM, Dinas tidak menyediakan anggaran khusus, hanya memberi informasi tentang permodalan magi pelku usaha, karena dinas hanya sebgai pendamping saja. Selanjutnya dari Ibu Samsiidar, SE sebagai Sub



Bagian Keuangan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan

Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato menambahkan bahwa :

“Di Indonesia sepanjang tahun memiliki banyak event – event pameran kusus UKM. Biasanya kami membuka akses kepada UKM yang memang memiliki potensi bisa memiliki pasar keluar daerah. Anggaran yang dimiliki UKM pasti terbatas, sehingga apabila produk mereka sebenarnya layak untuk mengikuti pameran-pameran besar di luarkota mereka akan kurang memungkinkan untuk mengikutinya. Jadi kami menciptakan akses untuk mereka agar dapat mengikuti event – event seperti itu. Maka kami memberikan mereka stand secara gratis dan tempat penginapan selama mengikuti pameran. Karena di Pohuwato punya banyak UKM yang bagus, kami melakukan seleksi, dan membagi tidak hanya di satu tempat, karena setiap tahun event seperti ini di selenggarakan di berbagai Kota dengan waktu yang berbeda.” (wawancara tanggal 17 April 2017, pukul 10.00 WITA diruangan Sekretaris Dinas Disperindagkop dan UKM kabupaten Pohuwato)

Dijelaskan bahwa dinas juga memberikan fasilitas untuk mengikutsertakan UKM dalam event nasional maupun di daerah. Dengan ikutsertanya UKM pada event UKM maka diharapkan mampu mengenalkan kepada pasar akan produk yang dimiliki kabupaten Pohuwato tidak kalah dengan produk yang sama di daerah lain. Event yang diadakan tidak hanya pada satu tempat saja, melainkan di berbagai daerah tdi tempat lain, keikutseraan UKM memang tidak sembarangan, perlu adanya seleksi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk mengikutsertakan UKM yang dianggap sudah siap bersaing dengan produk dari daerah lain pada pasar. Hal ini sejalan dengan

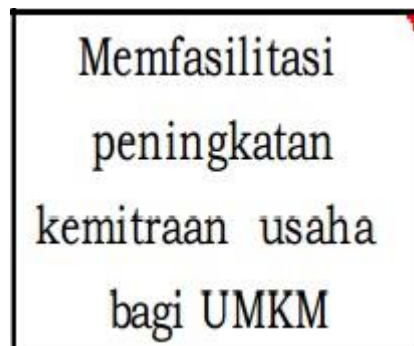
pernyataan salahsatu pelaku UKM di Kabupaten Pohuwato Pak Hasan sebagai perwakilan dari masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato

“Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupeten Pohuwato memang sangat peduli terhadap UKM-UKM yang berada di Kabupaten Pohuwato. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupten Pohuwato memberi akses mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan seperti halnya pengurusan PIRT dan HAKI, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupeten Pohuwato juga selalu mendampingi kami ketika kami mengikuti pameran-pameran di luar Kabupaten Pohuwato, kami diajarkan bagaimana cara promosi yang baik, menampilkan produk agar menarik dengan memaksimalkan sumber daya yang terbatasa kami miliki.” (wawancara tanggal 22 April 2017, pukul 15.30 WITA ditempat pelaku usaha Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato)

Dalam membangun UKM di Kabupaten Pohuwato, dinas berupaya untuk menjalin kerjasama atau bermitra dengan pihak lain, seperti pada rekomendasi dari dinas mengenai masalah permodalan, dinas bekerja sama dengan pihak pemberi modal. Sedangkan untuk pemasaran, dinas melakukan pendekatan kepada supermarket atau pasar di daerah maupun daerah lain untuk memasarkan produk dari UKM di daerahnya, walaupun bekerja sama dengan pihak supermarket susah dilakukan karena mempunyai kebijakan sendiri yang terkadang memberatkan dari pihak UKM untuk pemenuhan persyaratan yang dibebankan oleh pihak supermarket kepada pelaku usaha seperti, pelunasan dan sistem order yang berat bagi UKM yang sedang berkembang. Didukung dengan

kegiatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam merevitalisasi pasar menjadi lebih nyaman serta managemennya lebih baik diharapkan menjadi wadah antara penjual dan pembeli. Hubungan kerja sama seperti ini dilakukan untuk membangun UKM yang maju di Kabupaten Pohuwato.

**c. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM**



**Gambar 8. Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021**

*Sumber: Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2016-2021*

Terlepas dari upaya memfasilitasi kemitraan bagi UKM pemberian motivasi kepada UKM untuk terus berkarya merupakan salahsatu strategi unuk membangun UKM di kabupaten Pohuwato, pemberian motivasi juga dilakukan berupa seminar yang diadakan untuk memberikan inspirasi atau wawasan kepada UKM terutama yang sedang berkembang untuk lebih kreatif dan berkarya. Seperti dijelaskan oleh Ibu Yalina Akib, SE Kasi Bimbingan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato yang sejalan dengan bu Hj. Normawati

Tangahu, Am.Pd sebagai Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato

“Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato sering mengundang para pelaku UKM untuk mengikuti seminar-seminar secara gratis mengenai bagaimana mengelolah usaha yang baik. Hal ini sangat diperlukan untuk memberikan motivasi bagi para pelaku UKM agar keinginan mereka untuk meningkatkan keinginan lebih mengembangkan usaha mereka. Karena ketika usaha mereka telah berkembang mereka pasti akan bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya, mereka dapat membagi ilmu yang mereka milik atau menciptakan lapangan kerja sendiri apabila mereka mau.” (wawancara tanggal 09 Mei 2017, pukul 10.00 WITA diruangan Bidang Koperasi dan UKM Disperindagkop dan UKM kabupaten Pohuwato)

Seminar yang dilakukan berisi wawasan dalam mengolah usaha yang baik, yang dirasa perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam mengelola usaha mereka menjadi lebih baik lagi. Narasumber dari kegiatan seminar ini diisi oleh pelaku usaha yang sudah sukses maupun akademisi yang menyampaikan mengenai teori berbisnis dan mengelola bisnis dengan baik, sehingga pemilik UKM bisa mensimulasikan ilmu yang mereka dapatkan dan diterapkan kepada usha mereka sekarang, dengan harapan usaha yang masyarakat jalankan saat ini berkembang lebih baik dan memberikan manfaat bagi sekitar. Hal ini mendapat klarifikasi dari Pak Hasan sebagai perwakilan dari masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pohuwato yang sudah mengikuti beberapa seminar yang diadakan.

“Saya sering di Undang Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM untuk mengikuti seminar-seminar. Saya Senang mengikutinya karena saya merasa mendapat ilmu tambahan setelah mengikutinya. Bahkan saya sering sering di ajak bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato untuk mengajarkan bagaimana cara membuat produk dan berbisnis dengan baik.” (wawancara tanggal 22 April 2017, pukul 15.30 WITA ditempat pelaku usaha Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato)

Beberapa dari pelaku UKM memang tidak semua bisa mempercayai juga kebingungan jika teori saja yang mereka dapatkan, maka dari itu dinas juga mengundang pelaku UKM yang sudah sukses untuk mengisi atau menjadi narasumber dalam seminar agar pelaku usaha mendapatkan gambaran mengenai kondisi *riil* tentang melakukan usaha yang baik. Dengan cara ini pelaku UKM menjadi antusias mengikuti seminar, banyak ilmu yang dapat diserap dan diaplikasikan kepada usaha mereka.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberian motivasi sangatlah bermanfaat bagi para pelaku UKM untuk dapat mengembangkan usaha mereka. Melalui pemberian motivasi ini diharapkan pola pikir dan semangat para pelaku UKM dapat berkembang. Namun dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM kabupaten Pohuwato hanyalah fasilitator saja. Sehingga keberhasilan pemberdayaan UKM itu sendiri dapat dicapai apabila para pelaku UKM dapat memanfaatkan dan menerapkan apa yang telah diberikan oleh dinas.

## 2. Pelatihan Teknologi Pengemasan bagi Pelaku UKM

Banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ataupun dalam rangka pemenuhan kebutuhan, salahsatunya dengan pengelolaan sumberdaya alam. Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu cara yang paling cocok diterapkan di daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti pada Kabupaten Pohuwato. Dengan potensi kekayaan alam yang melimpah masyarakat dapat mengambil bahan mentah tersebut untuk dijual ke daerah lain yang membutuhkan, dengan demikian maka masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka. Akan tetapi jika masyarakat mengambil bahan mentah saja maka perputaran ekonomi akan *stuck* atau tidak ada perkembangan, makadari itu masyarakat harus bisa mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi bahkan menjadi barang jadi yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari yang hanya menjual dari bahan mentah saja. Proses dari bahan mentah kepada barang setengah jadi maupun barang jadi diperlukan adanya keterampilan khusus dari masyarakat itu sendiri, karena setiap bahan mentah mempunyai perbedaan dalam pengolahannya, maka dari itu dibarengi dengan *skill* yang dimiliki dapat mengolah bahan mentah menjadi barang yang mempunyai nilai jual lebih tinggi. Skill yang dimiliki oleh masyarakat dalam berproses didapat dari berbagai sumber, dari nenek moyang maupun dari media lain yang menunjang mereka untuk berdaya, seperti

pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, pihak akademisi, maupun pihak swasta. Dengan adanya pelatihan keterampilan diharapkan masyarakat mampu untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki di daerahnya dengan mengolahnya sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kabupaten Pohuwato merupakan salahsatu kabupaten yang mempunyai kekayaan alam melimpah di Provinsi Gorontalo, kekayaan alam di Kabupaten Pohuwato didominasi oleh hasil perkebunan seperti Kelapa, Kopi, Jambu Mete, serta Jagung. Masyarakat Kabupaten Pohuwato yang didominasi oleh petani sudah mampu untuk berdaya, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Pemerintah Pohuwato melihat sektor pertanian di Kabupaten Pohuwato sudah cukup baik, sehingga pemerintah daerah lebih memfokuskan pada sektor perdagangan dan industri. Dari sektor industri inilah masyarakat dituntut untuk mempunyai keterampilan dalam mengolah bahan mentah yang mereka dapatkan dari bercocok tanam menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi. Kabupaten Pohuwato sendiri mempunyai beberapa UMKM industri yang mengolah berbagai produk, seperti kelapa yang diolah menjadi minyak kelapa (*Virgin Coconut Oil*), untuk mengolah menjadi *Virgin Coconut Oil* (VCO) diperlukan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh masyarakat. Olahan kelapa tidak hanya daging kelapanya saja, akan tetapi tempurung kelapa juga bisa diolah menjadi berbagai macam kerajinan seperti centong, sendok dan mangkuk potensi

yang dimiliki Kabupaten Pohuwato bukan hanya di pertanian perkebunan saja, potensi kelautan juga dinilai menjanjikan seperti ikan roa, masyarakat umumnya menangkap ikan roa langsung dijual kepada masyarakat, ada juga yang dijual setelah melalui proses pengeringan, akan tetapi bagi wirausahawan di Kabupaten Pohuwato, ikan roa penjualannya tidak hanya sebatas itu saja, masyarakat membuat sambal yang berbahan dasar ikan roa, karena olahan ikan roa berupa sambal ini bersifat mudah rusak jika tingkat kelembapannya tidak terjaga, dihindarkan dari cahaya matahari berlebih, serta suhu yang tidak stabil, maka wirausahawan membuat kemasan berupa wadah khusus berupa tabung yang terbuat dari kaca maupun mika tebal untuk menjaga suhu dan kelembapan sehingga kemasan tersebut selain bisa menjaga isi lebih tahan lama, juga memungkinkan sambal tersebut untuk dijual ke berbagai daerah.



**Gambar 9. Ikan Roa kering**



**Gambar 10. Sambal Ikan Roa dalam kemasan tabung**

Olahan dari bahan mentah menjadi bahan yang sudah siap dipasarkan memang dibutuhkan keterampilan khusus dalam mengolah, akan tetapi keterampilan dalam penjualan juga dibutuhkan. Dalam menjual



dipengaruhi oleh beberapa hal seperti promosi, kualitas barang, target pasar dan pengemasan. Pengemasan sendiri merupakan bagian dari promosi, dimana pengemasan merupakan salahsatu unsur penting dalam menjual suatu produk. Konsumen menilai suatu produk dari kemasan, jika kemasan suatu produk meyakinkan maka kemungkinan besar konsumen akan membeli barang tersebut.

“Jadi kalo produknya sebgas apapun kualitasnya kalau cuma di bungkus plastik maka konsumen menganggap itu produk yang tidak berkualitas, makanya kemasan penting untuk memberikan satu penilaian terhadap produk kita” disampaikan oleh Bapak Yusuf Poluli, SE sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato. (wawancara tanggal 10 April 2017, pukul 09.00 WITA diruangan kepala dinas Disperindagkop dan UKM kabupaten Pohuwato).

Di Kabupaten Pohuwato sendiri masih banyak produk yang mereka hasilkan tidak dikemas dengan baik, sehingga tidak menarik untuk dilihat, padahal kualitasnya tidak kalah dengan produk yang sama akan tetapi kualitasnya berbeda. Maka dari itu pemerintah daerah mengadakan pelatihan pengemasan bagi masyarakat pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk pengemasan yang baik.

<p><b>Progran Iklim investasi dan Iklim Usaha</b></p> <p><b>Kegiatan dalam RENJA yang mendukung program ini adalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah</b></li> <li><b>2. Pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku UMKM</b></li> </ol>
--

**Gambar 11. Renja Program Iklim investasi dan Iklim Usaha Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri UKM kabupaten Pohuwato 2018**

*Sumber: Renja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri UKM kabupaten Pohuwato 2018*

Penyuluhan merupakan salahsatu cara dalam penyampaian informasi dari pemerintah untuk pengemasan suatu produk yang baik, sehingga produk yang sebelumnya mempunyai kemasan yang biasa saja (tidak menarik) dengan adanya penyuluhan dan pelatihan ini maka diharapkan masyarakat Kabupaten pohuwatoi mampu merubah kemasan produk mereka menjadi kemasan yang lebih menarik. Dalam penyuluhan dan pelatihan masyarakat biasanya mengundang pemerintah untuk datang di kelompok UKM mereka, atau pemerintah membuat jadwal mengenai kunjungan mereka ke UKM yang dirasa memerlukan pengarahan dalam pengemasan produk. Program ini tidak hanya pemerintah saja, akan tetapi pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta ataupun pihak akademis. Pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta dilakukan oleh pelaku usaha yang sudah memiliki nama atau pelaku usaha yang memiliki usaha yang sudah cukup besar. Sadar akan pentingnya kemasan, maka pelaku usaha membagi informasi kepada pelaku usaha lain yang sehingga usaha yang sedang dirintis menjadi lebih maju dari segi promosi penjualan melalui kemasan.

Pemerintah mengadakan agenda pelatihan dan penyuluhan ini setiap tahun disetiap daerah secara bergantian, agenda yang dijadwalkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya di isi oleh pemerintah saja, akan tetapi disi oleh pihak akademis maupun pihak swasta yang juga memberikan

pelatihan dan penyuluhan mengenai pengemasan. Dengan adanya sumber daya manusia dari pihak luar pemerintahan, menjadikan penyuluhan dan pelatihan menjadi tidak banyak menimbulkan masalah, walaupun masyarakat di Kabupaten Pohuwato juga bisa meminta waktu kepada pemerintah untuk diadakan penyuluhan didaerahnya, dengan adanya pertimbangan prioritas dari pemerintah maka akan mendahulukan yang mempunyai prioritas lebih tinggi daripada yang mempunyai prioritas rendah.

Masyarakat Kabupaten Pohuwato tidak hanya mengandalkan adanya pelatihan dan penyuluhan, masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelatihan tidak segan untuk membagikan ilmunya kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan materi dari pameri, bisa karena belum ada jadwal di daerah tersebut, atau kendala oleh jauhnya daerah tersebut untuk dijangkau, maupun kendala dari sumberdaya pameri yang masih berada di daerah lain yang menjadi prioritas. Masyarakat yang sudah sukses akan membagikan ilmunya kepada masyarakat lain dengan cara dikunjungi oleh UKM lain ataupun berkunjung ke UKM lain, ada juga pengusaha yang sudah maju ini di minta oleh kelompok UKM lain untuk memberikan pelatihan di tempat mereka, mengingat jadwal pelatihan dari pemerintah terlalu lama, maka masyarakat mempunyai inisiatif untuk mengadakan penyuluhan dari pengusaha lain. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat ini dinilai bagus,

karena masyarakat tidak pasif menunggu jadwal, akan tetapi aktif untuk mengembangkan usahanya sendiri.

Pelatihan dan penyuluhan yang telah diadakan tidak semuanya berjalan dengan yang telah direncanakan, karena ada beberapa UKM dengan dalih orisinalitas yang tetap mempertahankan pengemasan mereka seperti apa adanya, atau tetap mempertahankan pengemasan dengan menggunakan alat tradisional yang telah diberikan oleh nenek moyang. Tidaklah salah bagi mereka yang tetap mempertahankan ke aslian mereka dalam pengemasan karena itu adalah pilihan dari masyarakat sendiri untuk produk yang mereka tawarkan. Karena pandangan konsumen terhadap pengemasan tradisional tidaklah selamanya buruk, adajuga yang suka terhadap pengemasan tradisional yang dianggap menjaga kelestarian budaya. Yang sangat disayangkan adalah mereka yang tetap menggunakan pengemasan yang modern tetapi kurang menarik dan tetap berpegang teguh terhadap kemasan yang notabene kurang menarik. Modal merupakan alasan paling sering didengar oleh pemerintah dari masyarakat yang tidak mau merubah penampilan kemasan mereka menjadi pengemasan yang dirubah menjadi lebih baik. Memang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa perubahan kemasan moderen dari yang biasa menjadi yang menarik (*eye catching*) memerlukan modal, besarnya modal yang dikeluarkan berbanding lurus dengan bentuk, bahan, warna dan banyaknya jumlah yang diproduksi nantinya.

Masalah permodalan memang menjadi permasalahan yang mendasar bagi UKM yang sedang merintis usahanya bahkan yang sudah besar, karena dengan adanya modal yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka akan mudah pula membuat *business plan* kedepannya. Modal yang digunakan untuk mengubah kemasan lama menjadi kemasan yang baru, tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kreativitas saja, hal yang tidak kalah penting adalah modal, dengan banyaknya produk yang telah dihasilkan maka tidak sedikit pula kemasan yang dibutuhkan, oleh karena itu, permodalan untuk kemasan menjadi permasalahan bagi sebagian pemilik UKM di Kabupaten Pohuwato.

### **C. Pembahasan Data**

#### **Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah berbasis**

#### **Kewirausahaan**

##### **1. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah**

Langkah yang diambil pemerintah dalam mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kewirausahaan adalah menciptakan iklim berwirausaha yang kondusif untuk berkembangnya wirausaha yang baik bagi masyarakat. Dengan adanya iklim berwirausaha yang baik diharapkan masyarakat mempunyai kekuatan untuk mandiri, dalam pemenuhan kebutuhan mereka maupun dalam kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Daripada tujuan tersebut, pemerintah khususnya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM menyusun rencana

strategi yang ditujukan bagi mereka yang ingin mandiri, program yang telah dibuat bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang baik serta mempermudah masyarakat dalam berwirausaha. Strategi merupakan suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan (Salusu, 1998). Perencanaan strategi untuk membuat suatu kebijakan dari kecakapan suatu sumber daya organisasi yang menghasilkan kebijakan yang efektif serta yang paling menguntungkan dari pemerintah maupun masyarakat dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Terbentuknya rencana strategi yang telah dibuat tentunya tidaklah mudah, perlu adanya kesepakatan antar pembuat keputusan agar rencana strategi dapat tepat sasaran, langkah merencanakan yang utama diantara orang penting yang terlibat pembuat keputusan dan pembentuk opini internal serta para pemimpin eksternal, jika dukungan mereka dibutuhkan untuk keberhasilan upaya ini (Bryson, 2007).

Bryson (2007) menambahkan bahwa upaya perencanaan strategi harus terfokus kepada bagian dari organisasi yang dikontrol atau diawasi oleh orang-orang penting pembuat keputusan yang tertarik kepada perencanaan strategi. Dengan kata lain, hanya lingkungan yang kondusif maka akan sangat mungkin mengembangkan rencana strategi bagi organisasi. Pembuat rencana strategi untuk mengembangkan

perekonomian daerah melalui wirausaha menganggap kabupaten Pohuwato merupakan lingkungan yang sangat mendukung untuk dijadikan obyek pengembangan wirausaha, dikarenakan banyaknya masyarakat yang sadar akan pengolahan bahan baku di daerahnya yang juga tidak sulit untuk didapat, anantusiasme masyarakat terhadap wirausaha juga tinggi. Kemudahan dalam menciptakan iklim usaha bukan permasalahan yang perlu untuk di prioritaskan, akan tetapi dalam pengelolaan usaha yang baik (managemen usaha) yang masih menjadi kendala. Maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato membuat kebijakan dalam pengembangan ekonomi daerah melalui program penciptaan iklim investasi dan iklim usaha, yang terdiri dari fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dan pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku UKM.

#### **a. Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen**

Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah berupa pendampingan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk membantu dalam pengembangan usaha yang sedang berkembang. Tujuan utama dari UKM di Kabupaten Pohuwato adalah dalam mengolah sumberdaya yang tersedia untuk selanjutnya dikelola sedemikian rupa untuk dijadikan barang yang mempunyai nilai lebih. Seperti yang disampaikan oleh (Bamawi, 2012)

masyarakat Kabupaten Pohuwato telah melewati fase Exploring dan Planning, yang selanjutnya menuju fase *producting* yaitu fase yang menimbulkan manfaat atau faedah baru, dimana masyarakat berinovasi dengan membuat penemuan baru, pengembangan serta mengelola konsekuensi yang dihadapi. Dalam proses pengembangan UKM para pelaku usaha memiliki kesulitan yang umumnya terjadi maupun kesulitan secara individu, untuk mempermudah pengelolaan konsekuensi ini perlu adanya bantuan, maka dari itu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM memberikan fasilitas berupa klinik yang bertempat di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dimana masyarakat pengusaha bisa mengakses secara gratis untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam pengelolaan ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mengklasifikasikan permasalahan menjadi dua, yaitu permasalahan umum dan permasalahan khusus, menjadikan penelolaanya berbeda pula. Mengatasi permasalahan umum berbeda dengan permasalahan khusus, yaitu dengan mengadakan seminar yang diikuti oleh pengusaha yang memiliki permasalahan umumnya terjadi. Sedangkan penelolaan permasalahan khusus diadakan klinik yang dihadiri oleh individu atau beberapa saja dari pengusaha, karena permasalahan ini bersifat individu atau tidak semua pengusaha mengalami permasalahan khusus.



Sejalan dengan yang disampaikan oleh Siagian dalam (Agus, 2010) tentang pembangunan sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), dalam memajukan pengolahan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pohuwato, Dinas Dinas Perindustrian Perdagangan dan Industri UKM membuat rancangan usaha yang direncanakan sedemikian rupa yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat kabupaten Pohuwato melalui kewirausahaan sehingga taraf hidup dari masyarakat lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya perencanaan strategi yang dibuat oleh pemerintah daerah masyarakat lebih mudah dalam menjalankan usaha mereka, karena program yang dibuat untuk menunjang kegiatan kewirausahaan agar lebih maju dan moderen. Akan tetapi program kegiatan tidak hanya dibuat untuk menunjang kegiatan kewirausahaan pada saat itu saja, perlu dikaji lebih dalam agar program bisa diterapkan secara berkelanjutan (*continue*) dimasa mendatang.

**b. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi.**

Fasilitas dalam menciptakan akses bagi pemenuhan kebutuhan pelaku UKM juga merupakan bagian dari pendampingan yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam program

menciptakan iklim investasi dan iklim usaha. Mengikut sertakan UKM yang ada merupakan salahsatu fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Pohuwao, melalui event yang diadakan UKM selain sebagai ajang promosi, juga menjadi wadah untuk membangun jaringan antar UKM bukan hanya di Kabupaten Pohuwato saja, akan tetapi pada UKM daerah lain yang juga ikut serta dalam event tersebut. Dengan adanya jaringan antar UKM timbul dampak yang positif bagi perkembangan sesama UKM, bertukarnya informasi dan saling *sharing* menjadikan pandangan dan pengetahuan lebih luas. Secara tidak langunsg dari pembangunan jaringan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan bisnis antar UKM. Persaingan yang sehat antar UKM menciptakan adanya strategi baru untuk memenangkan pasar.

Selain dengan mengikutkan UKM pada event, para pengusaha diberi kemudahan dalam mengurus Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), walaupun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM hanya membimbing dalam pengurusan akan tetapi sudah merupakan usaha yang diciptakan dalam faslilitasi pengusaha. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM tidak menganggarkan dana khusus untuk permodalan, akan tetapi hanya memberi informasi tentang permodalan bagi pelaku usaha. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM juga memberikan fasilitas berupa informasi mengenai event pameran tingkat

daerah maupun nasional, para pelaku usaha yang sudah siap akan produknya di beri fasilitas untuk mengikuti event yang ada.

**c. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM**

Program peningkatan kemitraan merupakan program Dinas Koperasi dan UKM yang bertujuan terciptanya kerjasama antar pelaku UKM yang tidak hanya memiliki kesamaan produk akan tetapi juga diluar produk, dengan cara mengadakan seminar bisnis antar UKM. Seminar bisnis antar UKM memberikan banyak informasi dalam berbisnis bagi UKM yang sedang berkembang, narasumber dari seminar bisnis tidak hanya diambil dari ahli saja, akan tetapi juga ada dari praktisi. Diharapkan dengan adanya seminar bisnis UKM dapat mempraktekkan ilmu yang dianggap cocok dengan kondisi yang sedang dialami. Secara tidak langsung dari seminar bisnis tersebut juga memberikan motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus berkembang memajukan produknya dan juga memberikan manfaat bagi sekitar. Bagi beberapa UKM menerima teori yang disampaikan saja dirasa kurang, karena ada beberapa bagian yang kurang dimengerti, dengan mendapatkan kondisi yang realistis maka UKM yang kurang mengerti dengan teori yang disampaikan dapat memiliki gambaran tentang usaha mereka.

**2. Pelatihan Teknologi Pengemasan bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah**

Pembangunan di daerah tidak hanya berfokus terhadap perekonomian saja, akan tetapi ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan, seperti

sosial, perilaku dan kelembagaan, seperti yang disampaikan oleh (Kuncoro, 2004), pembangunan dapat dilihat sebagai proses multi dimensi yang mencakup tidak hanya pembangunan ekonomi namun juga mencakup perubahan utama dalam unsur sosial, perilaku dan kelembagaan. Peran masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur penting, seperti peran serta dan partisipasi sehingga kolerasi dan relevansi antara pemerintah dan masyarakat menjadi baik. Dengan adanya masyarakat yang menjadi obyek pembangunan, pemerintah memerlukan adanya rencana yang matang, sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran. Perencanaan merupakan suatu proses menyiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penggunaan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang sebesar-besarnya (Tjokroamidjojo, 1984). Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di kabupaten Pohuwato menyusun perencanaan dengan memaksimalkan sumberdaya di daerah untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Dengan potensi sumber daya alam yang ada, pemerintah Kabupaten Pohuwato terfokus kepada pengelolaanya, walaupun beberapa dari masyarakat sudah mengelola sumber daya ini dengan baik serta sudah dapat memenuhi kebutuhan, akan tetapi pengelolaanya masih berupa bahan mentah. Pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi akan menambah nilai dari barang tersebut sehingga mendapat nilai jual yang lebih. Dalam pengolahan menjadi

bahan jadi juga memerlukan *skill requirement* yang mumpuni juga, berbagai macam program kegiatan dibentuk untuk pemenuhan keterampilan ini sehingga barang jadi tersebut siap dipasarkan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh (Kartasasmita, 1997) menegaskan bahwa perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dan terus menerus yang dikembangkan secara sadar oleh pemerintah yang mewakili kekuatan-kekuatan perubahan dalam masyarakat, ini menunjukkan bahwa dalam pelatihan teknologi pengemasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak sekedar hanya untuk lebih mendapatkan nilai jual daripada suatu barang tersebut, tapi juga untuk menuju kearah yang lebih baik, lebih berkembang, juga dilakukan secara berkelanjutan (*continue*).

Selain keterampilan dalam pengolahan, keterampilan dalam penjualan perlu diperhatikan, dalam menjual barang maka perlu adanya aspek seperti promosi. Bentuk dari promosi dapat berbagai macam, seperti promosi melalui media, promosi dari kemasan, maupun promosi dari mengikuti event. Di kabupaten Pohuwato promosi yang dianggap kurang adalah pada kemasan, karena banyak produk yang sudah baik dalam pengolahannya akan tetapi kurang dalam pengemasan, dalam kasus ini bisa membuat calon konsumen melilai barang dengan kualitas yang baik menjadi kualitas yang biasa saja, karena pengemasan yang kurang menarik. Merespon dari permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian

Perdagangan Koperasi dan UKM mengadakan pelatihan yang diadakan melalui jadwal yang telah ditentukan, pemerintah datang kepada kelompok pengusaha untuk menalukan pelatihan dan penyuluhan untuk pengemasan yang baik. Masyarakat pengusaha terkandang meminta pemerintah untuk pelatihan diluar jadwal, akan tetapi pemerintah daerah harus menilai dengan skala prioritas untuk mendatangi kelompok pengusaha. Tidak semua pengusaha ikut dalam program ini, mereka lebih memilih untuk mempertahankan kemasan yang tradisional untuk produknya, mengingat produk yang mereka kelola sudah ada sejak dulu, dan memilih untuk tetap akan keorisinalitasnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis kewirausahaan di Kabupaten Pohuwato sudah baik namun belum maksimal. Adapun upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato menyusun rencana strategi berupa fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah dengan kegiatannya berupa pendampingan dalam pemecahan permasalahan yang umum terjadi pada pengusaha maupun khusus, mempermudah akses dalam mengurus pangan industri rumah tangga (PIRT), mengikut sertakan pemilik usaha dalam event pameran bersekala daerah maupun nasional.
2. Rencana strategi dalam pemasaran berupa pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku usaha kecil menengah dengan kegiatannya berupa pelatihan dan penyuluhan untuk teknologi pengemasan yang baik dan benar, sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih terlihat menarik, tahan lama, serta menjadi sebuah identitas dari produk.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran dalam rencana strategi pengembangan ekonomi daerah berbasis kewirausahaan di Kabupaten Pohuwato yang bisa diajukan adalah:

1. Dalam pengembangan pada sektor UKM pemerintah perlu adanya monitoring dan evaluasi dari keberadaan dan fungsi program pendampingan secara kontinyu yang telah dilakukan dan diterapkan kepada wirausahawan di Kabupaten Pohuwato, dengan adanya monitoring dan evaluasi maka bisa dilihat ke efektivitasan berkenaan dalam program pendampingan tersebut. Adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah lebih mudah untuk melihat apa saja kekurangan yang belum disentuh, sehingga pemerintah dapat melakukan respon terhadap kekurangan dari program pendampingan tersebut. Dengan begitu visi dan misi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan dan UKM lebih mudah tercapai.
2. Pemerintah Kabupaten Pohuwato lebih memperjelas mengenai standarisasi dalam pengemasan untuk mendukung teknologi pengemasan agar produk tetap baik dan terlihat menarik. Standarisasi mengenai kemasan yang mencantumkan berbagai informasi mengenai produk dimana akan memudahkan konsumen untuk menentukan langkah dalam pembelian. Secara tidak langsung juga akan meningkatkan nilai tambah dari produk tersebut. Sehingga produk yang telah di produksi siap untuk di pasarkan walaupun sebagian masyarakat tetap menggunakan metode kemasan tradisional.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi DKK. 2015. *Implementasi Teori-Teori Perencanaan Pembangunan Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang*. Laporan Magang (Magang Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang).
- Akdon. 2007. *Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Bapenas, Buku Pegangan. 2006. *Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, Jakarta.
- Bratakusumah, Supriady dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bryson, Jhon M. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Buchari Alma. 2013. *Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta
- Bygrave, W.D. 2001. *The Portable MBA in Entrepreneurship*. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Darmadi, Sukidin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo.
- David E, Mc Nabb. 2002. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management Quantitative and Qualitative Approaches*. New York: M, E, Sharpe, Inc.
- Depdikbud. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Geoffrey, G. Meredith, et. Al. 1996. *Kewirausahaan Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Presindo.

- Hamdani, Muhammad. 2012. *Enterpreneurship untuk Mahasiswa Sebuah Solusi untuk siap Mandiri*. Jakarta:Trans Info media.
- Hendro. 2005. *How to Become A Smart Entrepreneur and Start A New Business*. Bekasi : ArtSell.
- Jauch, Lawrence R. dan William F. Glueck. 1999. *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Krtasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Kuncoro. 2009. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr.Lexy J Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: Rosdakarya.
- Marbun BN. 1993. *kekuatan dan kelemahan Perusahaan kecil*. PT pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Mardikanto dan Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong,J.Lexy. 2007. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakary.
- Muljadi, Arief. 2006. *Pokok-Pokok dan Ikhtisar Manajemen Stratejik Perencanaan dan Manajemen Kinerja*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Munir, B. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Badan Penerbit BAPPEDA Propinsi NTB.

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, M. Arifin, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2008. USU Press, Medan
- Pemerintah R.I. 1995. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1995 Tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK). Jakarta: Pemerintah R.I.
- Purwanto, Iwan. 2008. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya.
- Rambat Lupiyoadi. 2007. *Enterpreneurship from mindset to strategy*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato Tahun 2016-2017.
- Rencana strategis (Renstra) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Dinperindakop Kabupaten Phuwater Tahun 2016-2021
- Riyanto, Astim, Arifah. 2000. *Dasar-dasar Keirusahaan*, YAPEMINDO, Bandung.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 1999. *Manajemen Jilid 1*. Jakarta: Prenhallindo.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saiman, Leonardus. 2014. *Kewirausahaan:Teori, Praktik, dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salusu, 1998. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siagian P, Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Angkasa.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi*. USU Press. Medan.
- Sirojuzilam. 2005. *Regional Planning and Development. Wahana Hijau. Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Vol.1 Nomor 1 Agustus 2005*.

- Sitanggang, H. 1999. *Perencanaan Pembangunan, Suatu Teori dan Praktek*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sjafrizal. 2009. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Baduose Media, Cetakan Pertama*, Padang.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suherman, Eman. 2013. *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfa Beta.
- Sukirno, Sadono. 2000. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah Dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bina Grafika.
- Suryana. 2013. *Kewirausahaan pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. UBPress. Malang.
- Susanto. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: LPP UNS & UNS Press.
- Sutopo, HB. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan 10*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- Trianto. 2010. *Mengembangkan Model Pembelajaran Tematik*, Jakarta: PT Prestasi Pustaka.
- Trijono, Lambang. 2007. *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Vincent Gaspersz. 2004. *"Perencanaan Strategik Untuk Peningkatan Kinerja sektor Publik*. Jakarta: PT gramedia

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Winarno. 2011. *Pengembangan sikap Entrepreneur dan Entrepreneurship*, Indeks, Jakarta.

Wisadirna, Darsono. 2005. *Metode Penelitian dan Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Ilmu Sosial*. Malang: UMM Press

[www.dadangsolihin.com/](http://www.dadangsolihin.com/) Keterkaitan Dokumen Perencanaan.  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/keterkaitan-dokumen-perencanaan>  
 Diakses tanggal 14 Agustus 2016

[www.slideshare.net/](http://www.slideshare.net/) Mekanisme dan Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan UU 25 tahun 2004.  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mechanisme-dan-proses-perencanaan-pembangunan-daerah-berdasarkan-uu-252004> Diakses tanggal 14 Agustus 2016

[www.slideshare.net/](http://www.slideshare.net/) Pentingnya Strategi Dan Akselerasi Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD. <http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mechanisme-dan-proses-perencanaan-pembangunan-daerah-berdasarkan-uu-252004>  
<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mechanisme-dan-proses-perencanaan-pembangunan-daerah-berdasarkan-uu-252004> Diakses tanggal 14 Agustus 2016

## LAMPIRAN



### KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

#### UNIVERSITAS BRAWIJAYA

#### FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : 4345/UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM  
Kabupaten Pohuwato, Gorontalo

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Pepen H. Akuba  
Alamat : Jl., Mertojoyo Barat 18, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur  
NIM : 125030606111002  
Jurusan : Administrasi Publik  
Minat : Perencanaan Pembangunan  
Tema : Rencana Strategis Program Mencetak Wirausahawan  
(Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo)

Lamanya : 2 (dua) bulan (1 April 2017 – 31 Mei 2017)

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 20 Maret 2017

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

  
Dr. Choirul Saleh, M.Si  
NIP. 19600112 198701 1 001

Surat izin Riset/Survey



## BUPATI POHUWATO

### REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 203 /Kesbang-Pol / § 0 / IV /2017

#### 1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
- b. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219 )
- c. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
- d. Undang-Undang Nomor 09 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah.
- e. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan rekomendasi penelitian.
- f. Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- g. Surat dari UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG Nomor : 4345/UN10.F03.11.11/PN/ 2017 Tanggal 20 Maret 2017.

#### 2. Menimbang :

Bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengembangan penelitian serta stabilitas daerah maka Perlu memberikan Rekomendasi Penelitian.

**BUPATI POHUWATO**, memberikan Rekomendasi Kepada :

- a. Nama : **PEPEN H. AKUBA**
  - b. NIM : 125030606111002
  - c. Alamat Peneliti : Desa Lemito Utara Kec. Lemito Kab. Pohuwato
  - d. Untuk : 1) Melakukan penelitian dengan judul “ **Rencana Strategis Program Mencetak Wirausahawan ( Studi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Pohuwato Provinsi Gorontalo )** “
- 2) Tujuan Penelitian :  
Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis rencana strategis program mencetak wirausahawan yang di kembangkan di kabupaten Pohuwato.
  - 3) Lokasi Penelitian : Dinas Koperindag Kabupaten Pohuwato.
  - 4) Waktu Penelitian : Mulai 01 April s/d 31 Mei 2017

- 5) Sebelum melakukan penelitian agar melapor ke Pemerintah setempat dan tempat yang menjadi obyek penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban.
- 6) Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
- 7) Apabila masa berlaku surat rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- 8) Hasil kajian agar diserahkan 1 (satu) eksampler kepada Bupati Pohuwato cq. Badan Kesbang-Pol Kabupaten Pohuwato.
- 9) Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan seperti tersebut diatas

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Marisa, April 2017  
 a.n. **BUPATI POHUWATO**  
**KEPALA BADAN KESBANG – POL**



**Drs. TADJUDIN PATA, M.Si**  
 NIP. 19670324 199003 1 004

**Tembusan :**

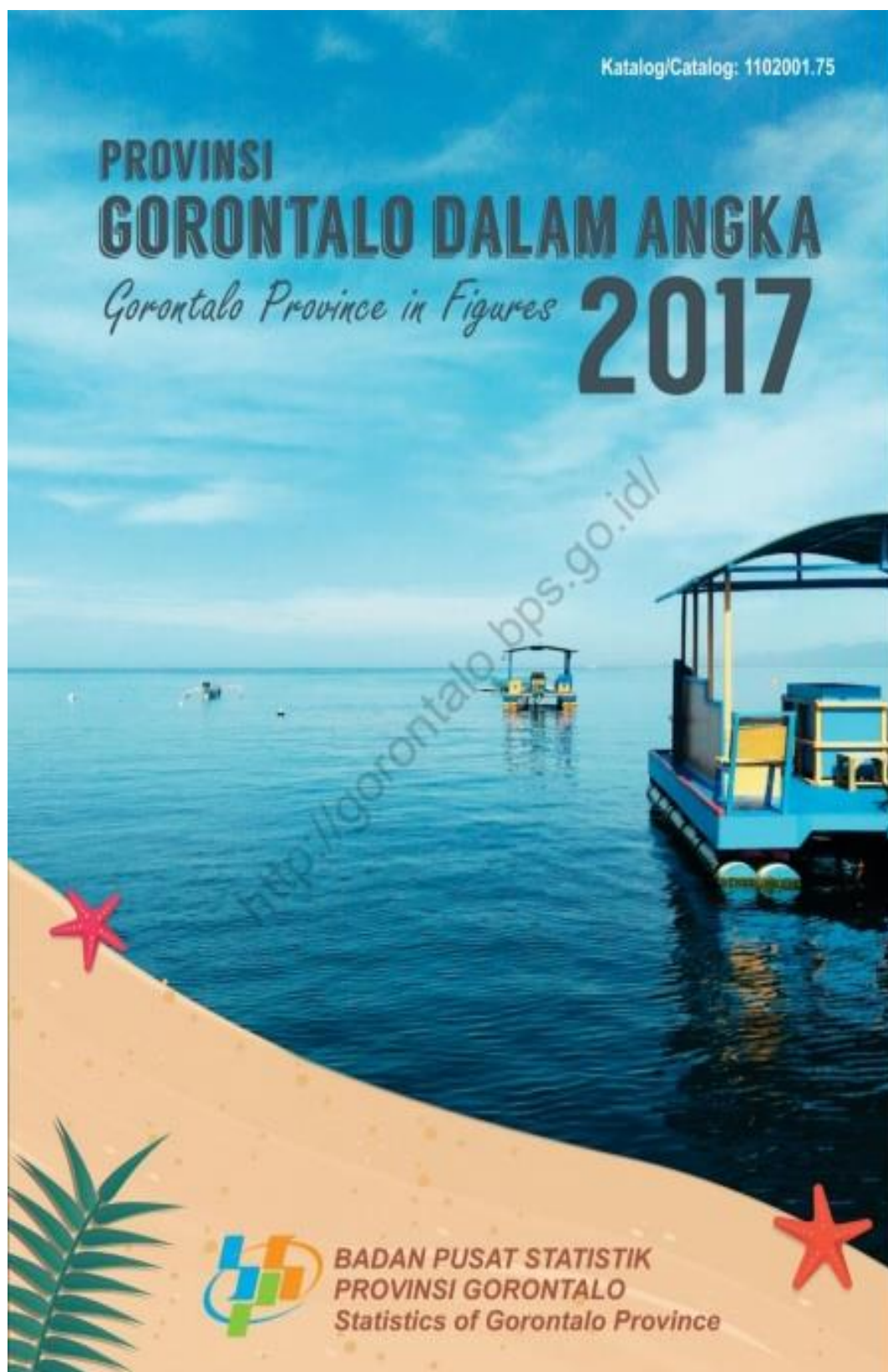
1. Yth. Bupati Pohuwato (sebagai laporan)
  2. Yth. Kabag Hukum Setda Kab. Pohuwato
  3. Yth. Kadis Koperindag Kab. Pohuwato
  4. Yth. Rektor Universitas Brawijaya Malang
- Yang Bersangkutan

Surat Rekomendasi Penelitian dari KESBANG-POL Kabupaten Pohuwato





Cover Rencana Strategi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Pohuwato 2016-2021



Cover Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2017



Wawancara Bersama Kepala Dinas Yusuf Poluli, SE Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Pohuwato, 2017



Foto Kegiatan Penelitian pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Pohuwato, 2017





Sosialisasi Gerakan 1000 UMKM Naik Kelas Provinsi Gorontalo



Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Koperasi dan UMKM di Gorontalo yang diikuti oleh seluruh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM se-Provinsi Gorontalo, 2017



Lembaga Permayarakatan Kelas III Pohuwato melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato membangun sebuah Industri Coco Fiber yang menjadi satu-satunya industri pengolahan kelapa terpadu di Provinsi Gorontalo.



Pemerintah Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato berfoto bersama pelaku UKM setelah melakukan Diklat Kewirausahaan dan Penghargaan Wirausaha 2017 dengan tema “Training of Fasilitator” di aula Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, 2017





Sebanyak 152 pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pembuatan strategi perencanaan bisnis (business plan) di ballroom Hotel Maqna Kota Gorontalo, 2017



Gubernur provinsi Gorontalo Rusli Habibi didampingi Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga saat Menhadiri pameran kewirausahaan di lokasi wisata pohon cinta kabupaten pohuwato, 2017